

LAPORAN TERAKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA



**KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS FESTIVAL ANGGARAN III-2017 PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH)**

TAHUN KE 1 DARI RENCANA 1 TAHUN

TIM PENGUSUL

KETUA : RACHMI KURNIA SIREGAR, M.I.KOM (0328016904)
ANGGOTA : WENNY MAYA ARLENA, MSI. (0311107706)

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

DESEMBER 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Komunikasi Organisasi Dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Festival Anggaran III-2017 Pada Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : RACHMI KURNIA SIREGAR, S.Sos, M.I.Kom
Perguruan Tinggi : Universitas Budi Luhur
NIDN : 0328016904
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Nomor HP : 081288777675
Alamat surel (e-mail) : rachmi.kurnia@budiluhur.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : WENNY MAYA ARLENA
NIDN : 0311107706
Perguruan Tinggi : Universitas Budi Luhur

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 15,395,000
Biaya Keseluruhan : Rp 15,395,000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi



(Prasetyo Jani)
NIP/NIK 050091

D.K.I. JAKARTA, 10 - 12 - 2017
Ketua,

(RACHMI KURNIA SIREGAR, S.Sos,
M.I.Kom)
NIP/NIK 080133

Menyetujui,
Direktur Riset dan PPM



(Prof. Dr. FX Suwanto, MS)
NIP/NIK 170017

RINGKASAN

Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasca Reformasi melibatkan eksekutif, yudikatif dan legislatif terus meningkat, seiring melesatnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu penyebabnya yakni lemahnya transparansi tata kelola anggaran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah di era Bupati Yoyok Riyo Sudibyo (2012-2017) berupaya menciptakan transparansi anggaran daerah dengan menyelenggarakan Festival Anggaran (FA) berisi laporan pertanggungjawaban APBD dan program pembangunan tahun sebelumnya. Selain menerapkan *e-Government*, lelang jabatan dan membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kasus dan triangulasi data dengan tujuan: 1) Menganalisis proses kebijakan komunikasi dan proses pembuatan kebijakan komunikasi FA 2) Mengkaji kendala penerapan kebijakan FA. Hasil penelitian: seiring pergantian kepemimpinan, Bupati Batang periode 2017-2022, Wihaji mencoret FA dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun Wihaji tetap berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif di antaranya dengan memperkuat *e-Government* dan *Smart City*. Pemkab Batang disarankan melanjutkan program transparansi tata kelola APBD melalui FA disesuaikan dengan kondisi terkini. Kiprah ini penting untuk tetap menjalin interaksi sosial yang kokoh antara birokrat dengan masyarakat di era digital. Serta sebagai identitas maupun karakteristik kawasan dalam mendukung pembangunan kawasan unggulan berbasis identitas untuk meningkatkan daya saing (*city branding*).

Kata kunci: Kebijakan Komunikasi, Komunikasi dalam Organisasi, Transparansi, Festival Anggaran.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir berjudul “Komunikasi Organisasi Dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Festival Anggaran III-2017 Pada Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah). Laporan ini disusun untuk menyelesaikan penelitian dosen pemula hibah Dikti anggaran tahun 2017 serta mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak:

1. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penguatan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Rektor Universitas Budi Luhur Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Didik Sulistyanto.
3. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, Rocky Prasetyo Jati, MSi
4. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur, Prof. Dr. FX. Suwanto, MS.
5. Berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini.

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya ilmu komunikasi.

Jakarta, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	18
BAB 4 METODE PENELITIAN	19
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	23
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proses Kebijakan Komunikasi Festival Anggaran Batang 2014-201628

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pola pikir penelitian	19
Gambar 2. Alur Pikir Penelitian	21
Gambar 3. Strategi Kepala Daerah di era Yoyok Riyo Sudibyo	23
Gambar 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang <i>eGovernment</i>	24
Gambar 5. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini didampingi Bupati Batang (2012-2017) Yoyok Riyo Sudibyo saat Festival Anggaran Batang 2016 di samping kantor Pemkab Batang di Jl Veteran.	34
Gambar 6. Seorang ibu menggendong anaknya melihat gaji bupati saat Festival Anggaran Batang 2016 yang diadakan Bupati Batang (2012-2017) Yoyok Riyo Sudibyo.	35
Gambar 7. Petugas Kecamatan Lumpung, Pemkab Batang menunjukkan penggunaan anggaran 2015 dalam Festival Anggaran Batang 2016..	36
Gambar 8. Model Komunikasi Festival Anggaran Batang	37
Gambar 9. Bupati Batang (2017-2022), Wihaji	38
Gambar 10. Festival Anggaran oleh Pemkab Karanganyar pada Oktober 2017....	38
Gambar 11. Festival Anggaran ala Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan yang menampilkan Portal Data APBN pada 22 Maret 2017 di Jakarta.	39
Gambar 12. Pengunjung di Festival Anggaran Batang 2016.	41
Gambar 13. Ketua DPRD Batang, Teguh Rajarjo	42
Gambar 14: Penyelenggaraan pemerintahan bidang <i>eGovernment</i> Bupati Wihaji	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen.....	55
Lampiran 2: Personalia Tenaga Pelaksana Beserta Kualifikasinya.....	67
Lampiran 3: Publikasi Penelitian.....	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca Reformasi seiring melesatnya nilai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun APBD, praktik korupsi yang melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif semakin menjamur. Selama 2010-2014, aparat menyidik 2.492 kasus korupsi dengan total nilai kerugian negara Rp 30 triliun dan nilai suap Rp 549 miliar.

Tingginya kasus korupsi salah satunya karena pengelolaan negara maupun pemerintahan daerah yang belum transparan. Padahal transparansi sangat penting demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) terkait penyelenggaraan pemerintahan yang „bersih“, demokratis dan efektif. Upaya ini hanya dapat dilakukan jika terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

Mengantisipasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di jajarannya, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo yang mulai bertugas pada 2012 membangun kepercayaan publik. Ini dilakukan karena mantan bupati sebelumnya terjerat kasus korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berbagai terobosan dilancarkan mulai menerapkan lelang jabatan, membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2), layanan pengadaan secara elektronik serta mengadakan Festival Anggaran, untuk selanjutnya disingkat FA, yang merupakan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun sebelumnya.

Semula FA dilakukan dengan membagikan brosur, pamflet dan rapat akbar tapi hal ini dinilai tidak efektif. Mulai 2014, FA diselenggarakan secara indoor di samping rumah dinas Bupati Batang yang menampilkan anggaran SKPD dan kelurahan dari masing-masing kecamatan dalam bentuk *booth*.

Kiprah Yoyok ini meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award 2015 bersama Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Pemkab Batang yang mengklaim sebagai pelopor FA di Indonesia kini menjadi pusat pembelajaran bagi

pemerintahan lainnya mulai tingkat kabupaten, kota hingga provinsi. Pemkab Karang Anyar mengadopsi FA Batang 2016 namun memamerkan anggaran tahun berjalan.

Upaya Yoyok menggelar FA bertujuan memenuhi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang resmi diberlakukan 1 Mei 2010. Melalui UU tersebut, diharapkan dapat mendorong transparansi dalam pengelolaan negara serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Bahkan dengan penerapan UU ini, setiap badan publik harus mempersiapkan diri secara optimal, karena informasi yang bersifat rahasia sekalipun dapat dibuka oleh Komisi Informasi untuk umum dalam merespon permohonan pemohon informasi publik.

Situs Blitar.go.id mengemukakan keterbukaan informasi publik berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat terkait rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Belum transparannya pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan sehingga rentan memicu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- b. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi publik tentang pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kebijakan komunikasi Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo untuk membuka informasi publik terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Kebijakan komunikasi dan pembuatan keputusan kebijakan komunikasi Festival Anggaran Batang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan komunikasi dan pembuatan keputusan kebijakan komunikasi FA?
- b. Apa kendala yang dihadapi Pemkab Batang dalam menerapkan kebijakan FA?

1.5 Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah:

- a. Pemakalah pada temu ilmiah nasional.
- b. Publikasi ilmiah yang memiliki ISSN.
- c. Model kebijakan komunikasi FA.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Organisasi

Komunikasi merupakan kegiatan sehari-hari yang terhubung dengan semua aktivitas dan menjadi pusat kehidupan manusia, melalui proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi sebagai dasar kehidupan. Setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi cara berkomunikasi dengan orang lain. Hovland dalam Effendy (2005:10) mengungkapkan komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Selain menyampaikan informasi, komunikasi juga bertujuan mendidik dan memengaruhi orang lain.

Lasswell dalam Mulyana (2008:69) menyebutkan lima unsur dalam proses komunikasi yaitu sumber (pengirim pesan/komunikator), pesan (dapat berupa makna, bentuk atau simbol), saluran atau media yang digunakan pemberi pesan, penerima pesan (komunikan) dan efek.

Penyampaian pesan oleh sumber dalam implementasinya dikenal tiga pendekatan yang digunakan meliputi komunikasi satu arah yakni tindakan penyampaian pesan atau ide dari seseorang (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media. Gerald R. Miller berpendapat komunikasi satu arah terjadi saat sumber menyampaikan pesan kepada penerima bertujuan memengaruhi perilaku penerima. Komunikasi sebagai interaksi menempatkan sumber dan penerima memiliki kedudukan sederajat dengan adanya tanggapan terhadap suatu pesan. Pendekatan pada komunikasi sebagai transaksi berfokus pada makna dan berbagi dengan memperhitungkan semua faktor lain dalam proses komunikasi.

Proses komunikasi melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.

Organisasi merupakan suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Rogers, M Everest (Afdjani,2014:118) menyebutkan

organisasi sebagai suatu sistem dari individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Organisasi dibentuk melalui komunikasi saat individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan individu dan tujuan bersama.

Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terfokus pada individu yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Ilmu komunikasi menyoroti bentuk komunikasi yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik yang digunakan, media yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor penghambat dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, diperlukan kemampuan komunikasi dari setiap individu dalam suatu hubungan, kelompok, masyarakat maupun organisasi untuk menyampaikan pesan baik secara langsung maupun melalui media dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain komunikasi dalam suatu organisasi merupakan hal mutlak dalam mewujudkan tujuan organisasi, selain berbagai aspek lainnya.

Komunikasi organisasi sebagai upaya pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam organisasi kelompok formal maupun kelompok informal organisasi (Devito, 1997).

Pace & Faules (2000) berpendapat komunikasi organisasi merupakan pertunjukkan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Sedangkan Goldhaber (1993) mendefinisikan komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaring hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah.

Dari batasan di atas, dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan sejumlah individu melalui pembagian tugas dan peranan masing-masing dalam proses penyampaian pesan atau ide dari sumber yang bertujuan memengaruhi maupun merubah perilaku orang lain. Hal tersebut mencerminkan adanya kekuasaan atau pengaruh yang kuat dari pemberi pesan atau sumber (komunikator).

Pengaruh sebagai esensi dasar dari kepemimpinan untuk menjual gagasan-gagasan, mendapatkan penerimaan dari kebijakan-kebijakan atau

rencana-rencana, dan memotivasi orang lain supaya mendukung dan melaksanakan keputusan-keputusan (Yuki 1998) dalam Julianti (2015,35).

2.1.1 Fungsi Komunikasi dalam Organisasi

Dalam sebuah organisasi, komunikasi diibaratkan sebagai darah dalam tubuh (Ruben,2014:vii). Conrad (dalam Tubbs dan Moss,2005) mengidentifikasi tiga fungsi komunikasi organisasi yaitu:

1. Fungsi perintah berkenaan dengan anggota-anggota organisasi mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi antara sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut.
2. Fungsi relasional terkait dengan komunikasi memperbolehkan anggota-anggota menciptakan dan mempertahankan hubungan personal dengan anggota organisasi lain.
3. Fungsi manajemen ambigu terkait pilihan dalam situasi organisasi kerap dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Komunikasi adalah alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan yang melekat dalam organisasi.

Dikaitkan dengan fungsi komunikasi dalam organisasi, peneliti membatasi untuk mengkaji fungsi perintah yakni pada prinsipnya individu dalam organisasi memiliki hak dan kewajiban untuk membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam mencapai tujuan bersama, suatu organisasi membuat pengelompokan kegiatan dan pembagian/ pengaturan tugas untuk masing-masing individu maupun unit-unit yang ada dengan menyusun struktur organisasi. Peranan pimpinan sangat menentukan dalam sukses tidaknya suatu organisasi berlangsung dan menuntut kepiawaian pimpinan dalam membangun sistem komunikasi.

Schermerhorn (1996) mendefinisikan struktur organisasi adalah sistem tugas, alur kerja, hubungan pelaporan dan saluran komunikasi dalam kelompok yang dilakukan bersama-sama. (<http://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-contoh-bentuk-struktur-organisasi/>)

Struktur organisasi sebagai aktivitas komunikasi dan ditentukan oleh perilaku yang saling berhubungan (Pace & Faules,2000). Adanya pola interaksi dalam suatu organisasi juga diperkuat oleh Robbins (2003) di mana struktur organisasi mengatur dan mengelompokkan pembagian tugas yang dikoordinasikan secara formal. Ia mengelompokkan 6 unsur dalam merancang struktur organisasi sebagai berikut:

1. Spesialisasi pekerjaan, pada tingkat apa tugas dibagikan dalam pemisahan pekerjaan.
2. Departementalisasi, di mana pengelompokkan pekerjaan dilakukan atas dasar tugas yang sama atau mirip sehingga pekerjaan tersebut dapat dikoordinasikan.
3. Rantai komando, untuk siapa laporan yang dibuat individu dan kelompok.
4. Rentang kendali, berapa banyak individu yang dapat diatur.
5. Sentralisasi dan desentralisasi, di mana letak wewenang pengambilan keputusan.
6. Formalisasi, pada tingkat apa suatu aturan dan kemudahannya akan mengatur pekerjaan dari manager.

2.1.3 Dimensi Komunikasi dalam Organisasi

Dalam kehidupan organisasi (Romli,2014:6) terdapat dua dimensi komunikasi yakni:

1. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dan bawahan, antara sesama bawahan,dan sebagainya.

Komunikasi internal lazim dibedakan menjadi dua bagian:

- a. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan ke pimpinan. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi, petunjuk dan informasi kepada bawahannya. Sedangkan bawahan memberi laporan, saran, pengaduan dan lainnya kepada pimpinan.
 - b. Komunikasi horizontal atau lateral, yaitu komunikasi antara sesama seperti karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer. Pesan dalam komunikasi ini bisa mengalir di bagian yang sama dalam organisasi atau mengalir antar-bagian.
2. Komunikasi eksternal organisasi ialah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada organisasi besar, komunikasi ini lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada pimpinan kecuali hal yang penting.
- a. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak dapat melalui berbagai bentuk seperti majalah organisasi, press release, artikel surat kabar.
 - b. Komunikasi dari khalayak kepada organisasi berupa umpan balik dari kegiatan yang dilakukan organisasi.

Dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti membatasi untuk mengkaji komunikasi dalam organisasi pada dimensi komunikasi internal yang difokuskan pada komunikasi vertikal.

2.2 Teori Informasi Organisasi

Komunikasi organisasi pada Pemkab Batang dapat dikaji saat Bupati Batang berinteraksi dengan jajarannya. Dalam organisasi erat kaitannya dengan interaksi antara individu satu sama lain melalui aktivitas komunikasi.

Teori Informasi Organisasi di bawah naungan pemikiran Sibernatika, digagas Karl Weick dalam John (2011:364) memandang susunan sebagai sesuatu

yang muncul dari pola-pola interaksi dalam organisasi. Teori ini menempatkan komunikasi di bagian depan sebagai proses kunci yang digunakan untuk memperoleh susunan organisasi dan menekankan tentang proses berorganisasi. Weick menekankan pentingnya berorganisasi dalam bidang komunikasi, karena komunikasi merupakan dasar pengorganisasian manusia dan dasar pemikiran dalam memahami manusia berorganisasi. Lebih dari itu kegiatan berorganisasi berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi.

Menurut Weick, organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tapi oleh aktivitas komunikasi. Organisasi pada dasarnya merupakan sesuatu yang dicapai manusia melalui sebuah proses komunikasi berkelanjutan. Saat manusia berinteraksi pada dasarnya menciptakan organisasi. Semua perilaku dihubungkan karena seseorang bergantung pada perilaku orang lain.

Teori ini mengkombinasikan siklus perilaku komunikasi dan aturan bersama sebagai strategi organisasi untuk meminimalisir ketidakpastian informasi.

Dalam siklus perilaku komunikasi meliputi:

1. Aksi/tindakan yang merupakan suatu pernyataan atau perilaku seorang individu. Suatu aksi mengacu pada pernyataan komunikasi dan perilaku yang menunjukkan ketidakpastian seseorang.
2. Interaksi/repons yaitu reaksi terhadap aksi. Suatu respon bertujuan mengklarifikasi terhadap informasi yang tidak pasti dan dikemukakan sebagai hasil dari aksi yang dilakukan sebelumnya.
3. Penyesuaian yaitu tanggapan terhadap respon yang merupakan penyesuaian terhadap aksi yang diterima sebelumnya.
4. Interaksi ganda yaitu siklus dari aksi, respon dan penyesuaian dalam berbagai pertukaran informasi. Interaksi ganda mengacu pada sejumlah siklus perilaku komunikasi yang digunakan untuk membantu anggota organisasi dalam mengurangi ketidakpastian informasi. Contoh interaksi ganda misalnya rapat rutin, konferensi, menelepon, saling mengirim memo, diskusi, interview dan sebagainya.

Sedangkan dalam aturan bersama, Weick menekankan pengaturan terhadap aktivitas anggota organisasi.

Bertolak dari penjelasan di atas, peneliti membatasi mengkaji bagaimana siklus perilaku komunikasi organisasi yang berlangsung di Pemkab Batang khususnya dikaitkan dengan Festival Anggaran sebagai subjek penelitian ini.

Peneliti tertarik mengkaji bagaimana tindakan Bupati Batang dalam menyampaikan ide, perintah atau pernyataan tentang Festival Anggaran kepada jajarannya. Serta bagaimana respon dari bawahan terhadap ide Festival Anggaran dan selanjutnya apa tindak lanjut dari Bupati Batang atas respon para staf hingga terjadinya interaksi ganda.

2.3 Kebijakan Komunikasi

Harjana, Andre dalam Buku Audit Komunikasi, Teori dan Praktek (<http://www.kamusbesar.com/64003/kebijakankebijakan-komunikasi>) mendefinisikan kebijakan komunikasi adalah rencana-rencana strategik dari jaringan-jaringan komunikasi fungsional untuk mencapai tujuan-tujuan khusus komunikasi melalui kegiatan-kegiatan komunikasi yang sesuai dengan rancangan organisasi.

Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan kebijakan komunikasi adalah rencana strategik dari suatu organisasi melalui jaringan komunikasi fungsional untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan komunikasi berkaitan dengan perkembangan sosial, politik dan ekonomi sebuah negara. Chakravartty dan Sarikakis (2006,7) dalam Abrar (2008:4) mengungkapkan kebijakan komunikasi memiliki konteks, domain dan paradigma.

Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya, misalnya politik-ekonomi, politik komunikasi dan lainnya. Konteks ini sangat penting bagi kebijakan komunikasi karena menentukan domain kebijakan komunikasi.

Domain kebijakan komunikasi bermakna muatan nilai yang dikandung kebijakan komunikasi, seperti globalisasi, ekonomi global dan sejenisnya. Domain disebut juga sebagai fungsi konteks kebijakan komunikasi. Karena konteksnya

politik ekonomi misalnya, maka domain kebijakan komunikasinya adalah ekonomi global.

Sedangkan paradigma berarti kerangka cita-cita dari kebijakan komunikasi yang dituju, seperti terbentuknya masyarakat informasi, menguatnya *civil society* dan sebagainya.

Kebijakan komunikasi memiliki lima kriteria: 1) Memiliki tujuan tertentu 2) Berisi tindakan pejabat pemerintah 3) Memperlihatkan tindakan yang dilakukan pemerintah 4) Bisa bersifat positif atau negatif 5) Bersifat memaksa (otoritatif)

Tujuan kebijakan komunikasi dari sisi sosiologi adalah menempatkan proses komunikasi sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak merugikan masyarakat. Kebijakan komunikasi pada intinya bertujuan mendukung kelancaran sistem komunikasi yang berlaku dalam suatu negara (Abrar:2008:16-17)

Kebijakan komunikasi tak terlepas dari kebijakan publik. Dye (2008:1) menyebutkan: "*public policy is what ever governments choose to do or not todo.*" Terjemahan bebasnya adalah kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau pun tidak dikerjakan.

Jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut yang meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Sebaliknya yang tidak dikerjakan pemerintah juga termasuk kebijakan negara.

Kebijakan publik menurut Willam (1971) dalam Situmorang (2003:20) merupakan keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.

Dari kedua pengertian di atas, penulis memahami kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun yang tidak dilakukan pemerintah sehubungan dengan tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat memengaruhi tindakan individu dalam masyarakat.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, sepatutnya dibuat sejumlah tahapan sebagai prosedur kerja agar sasaran dan target dapat tercapai.

Dunn (2003:24-25) menguraikan proses pembuatan kebijakan publik dituangkan dalam lima tahapan yang saling bergantung diatur menurut urutan waktu sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda; pada tahap ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.
2. Formulasi kebijakan; para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah dan memandang perlunya dibuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
3. Adopsi kebijakan; alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara lembaga direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan: kebijakan yang telah diambil dilaksanakan setelah oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Evaluasi kebijakan; unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

2.4 Transparansi

Transparansi secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Transparansi juga diartikan sebagai keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting. (<http://kbbi.web.id/transparansi>)

Mardiasmo (2003:30) menguraikan transparansi adalah keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Sedangkan Tjokromidjoyo (2003:123) menjelaskan transparansi dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha.

Dari sejumlah definisi di atas, penulis memahami transparansi merupakan upaya keterbukaan informasi dari pemerintah, organisasi dan badan usaha terkait kebijakan, rencana kerja/program pembangunan dan pengelolaan keuangan sehingga dapat diketahui masyarakat ataupun pihak berkepentingan.

Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *goodgovernance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintahan, keadilan dapat ditumbuhkan. (Tahir,2014:109). Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik oleh pihak yang berkepentingan.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua hal yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meminimalisir peluang praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meminimalisir peluang praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
4. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meminimalisir peluang praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Dalam penelitian ini penulis membahas transparansi pengelolaan keuangan daerah dari penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun program pembangunan yang akan dilakukan, sebagai implementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang (UU) No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Serta diberlakukannya UU RI No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai konsekuensi logisnya, penyelenggara negara harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara negara. Namun tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

2.5 Festival Anggaran

2.5.1 Festival

Festival menurut Stoeltje (1992:261) dalam Indriasari (2009:2) adalah sesuatu yang berulang secara periodik, merupakan peristiwa sosial yang lewat bentuk-bentuk umumnya terdiri dari rentetan peristiwa yang dikoordinasikan, melibatkan secara langsung atau tidak langsung dan untuk maksud yang beragam, seluruh anggota dari keseluruhan komunitasnya, disatukan oleh etnisitas, bahasa, agaman, ikatan kesejarahan dan saling tukar pandangan di antara mereka.

Sedangkan Kaeppler (1987) mendefinisikan festival adalah sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Daerah-daerah yang sedang berkembang biasanya menggunakan festival untuk tujuan tersebut.

Setiap festival memiliki karakteristik atau unik sehingga tidak ada standarisasi khusus yang mengatur semua jenis festival. Terlebih lagi festival sebagai event yang dimiliki sekelompok orang atau organisasi yang mengusung kekuatan khusus, spirit, pengetahuan dan peningkatan adat kekeluargaan. (Noor,2013:30).

Event itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting baik secara individu atau kelompok dengan tujuan tertentu yang melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu.

Bertolak dari definisi di atas, penulis memahami festival sebagai sarana komunikasi yang mengemban visi dan misi khusus, dengan menampilkan fenomena sosial sebagai hasil koordinasi dari pihak terkait dalam suatu organisasi/institusi pemerintah/badan usaha yang dilakukan secara periodik, bertujuan membangun ataupun memberdayakan suatu kawasan.

Dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti membatasi festival sebagai ajang komunikasi untuk mewujudkan transparansi penggunaan anggaran dan rencana pembangunan kepada publik sebagai kegiatan rutin tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah sesuai prinsip demokrasi maupun era keterbukaan informasi.

Festival sebagai event salah satunya bertujuan sebagai media komunikasi bagi sebuah kota dalam menampilkan karakteristik khusus sebagai keunikan wilayah atau kawasan. Penyelenggaraan festival diharapkan dapat mendorong roda pembangunan dalam segala bidang, meningkatkan daya investasi maupun reputasi daerah. (Getz,2008:403)

2.5.2 Anggaran

Setiap aktivitas termasuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan membutuhkan anggaran yang dialokasikan dari APBN ataupun APBD untuk membiayai pembangunan dalam berbagai sektor demi terwujudnya tujuan pemerintahan daerah.

Terkait hal ini APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan bagi suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun anggaran merupakan dokumen kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat penting dan merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mendefinisikan anggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Anthony dan Young (2003) dalam Adrianto (2011:7) menguraikan anggaran sebagai suatu rencana yang disajikan secara kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang yang di susun untuk periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran secara jelas mengekspresikan apa yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan dan menyatakan juga otoritas penggunaan sumber daya keuangan yang diperlukan.

Berpijak dari definisi di atas, dapat disimpulkan anggaran merupakan rencana kerja dari suatu organisasi yang berlaku untuk periode tertentu dalam bentuk uang demi tercapainya tujuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 mengatur struktur APBD terdiri atas tiga bagian yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk pendapatan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada bagian belanja, dikelompokkan menjadi lima, yaitu Belanja Administrasi Umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pembiayaan penerimaan daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka FA adalah ajang komunikasi untuk mewujudkan transparansi penggunaan keuangan daerah maupun rencana kerja yang berlaku untuk periode tertentu dalam bentuk uang, yang disampaikan kepada publik sebagai kegiatan rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah sesuai prinsip demokrasi maupun era keterbukaan informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN.

2.6 Studi Literatur Penelitian Sebelumnya

Peneliti tertarik menggali fenomena FA sebagai bagian dari rangkaian reformasi birokrasi yang dilakukan Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo di jajarannya. Terobosan yang dilakukan Yoyok terkait FA menginspirasi Pemkab lainnya seperti Pemkab Tegal, Pemkab Pekalongan dan Pemkab Karang Anyar.

Sepengetahuan peneliti, riset FA Batang maupun reformasi birokrasi oleh Bupati Batang (2012-2017) Yoyok masih sangat terbatas. Namun peneliti mencoba mengkaitkannya dengan penelitian yang relevan sesuai konteks penelitian ini.

- a. **Abdul Aziz** dari Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (2016) meneliti **Persepsi Masyarakat Batang Terhadap Festival Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batang)**, bertujuan mencari gambaran persepsi masyarakat terhadap Festival Anggaran dan manfaat dari Festival Anggaran. Penelitian menggunakan survei dan hasilnya responden menilai

Festival Anggaran penting untuk dilaksanakan dan menjadi program rutin karena bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap APBD, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan.

- b. **Mashun Mukromin Ahmad** dari Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip (2016) meneliti **Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Batang (Kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo, Periode 2012-2017)**. Penelitian ini menggunakan teori pemberantasan korupsi dari Pope (2003) dengan metode penelitian kualitatif. Hasilnya selama masa kepemimpinan Yoyok, reformasi birokrasi sudah jauh lebih baik. Tapi diperlukan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia khususnya kualitas birokrasi agar mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional yang berkelanjutan.
- c. **Muhd. Isnaini** (2011) dari Universitas Indonesia meneliti tentang **Komunikasi Organisasi di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Perguruan Tinggi XY**. Tesis ini bertujuan memberi masukan kepada pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi khususnya pada komunikasi organisasi yang baik menjadikan kinerja perpustakaan lebih baik. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi organisasi dari Pace, Faules dan Goldhaber, studi kasus dan kualitatif. Hasil tesis ini antara lain komunikasi organisasi yang terjadi di kalangan internal pengelolaan perpustakaan belum optimal, serta tidak ada keterbukaan antara atasan dan bawahan dalam berkomunikasi.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis kebijakan komunikasi dan pembuatan keputusan kebijakan komunikasi FA.
- b. Mengkaji kendala yang dihadapi Pemkab Batang dalam menerapkan kebijakan FA.

3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

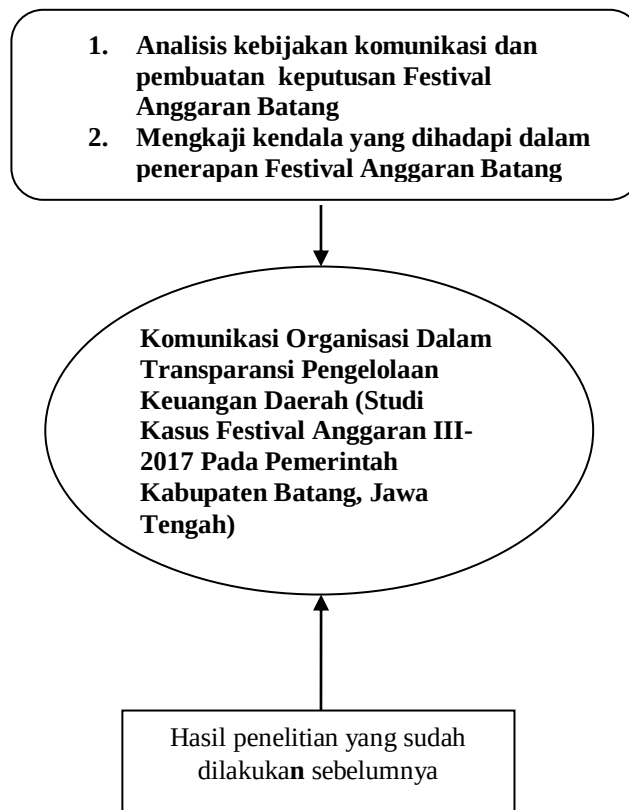
- a. Dalam aspek praktis, penelitian diharapkan bermanfaat menetapkan strategi kebijakan komunikasi FA oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait pengelolaan keuangan anggaran untuk membangun tata pemerintahan yang bebas KKN.
- b. Secara akademis penelitian ini diharapkan bermanfaat karena memberi kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, terutama pengembangan komunikasi organisasi.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Pola Pikir

Pola pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Pola pikir penelitian

Peneliti pada 2016 diundang Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo untuk meliput FA II. Menurut peneliti, event ini termasuk langka karena belum pernah ada pemerintah daerah yang secara terbuka menampilkan data-data pengelolaan anggaran termasuk gaji bupati, wakil bupati dan kalangan DPRD serta pembangunan secara langsung ke publik. Selanjutnya tercetus ide untuk meneliti FA dikaitkan dengan kebijakan publik dalam hal ini komunikasi organisasi yang berlangsung di Pemkab Batang. Sebagai referensi, peneliti mencari berbagai studi literatur penelitian sebelumnya terkait komunikasi organisasi dan komunikasi

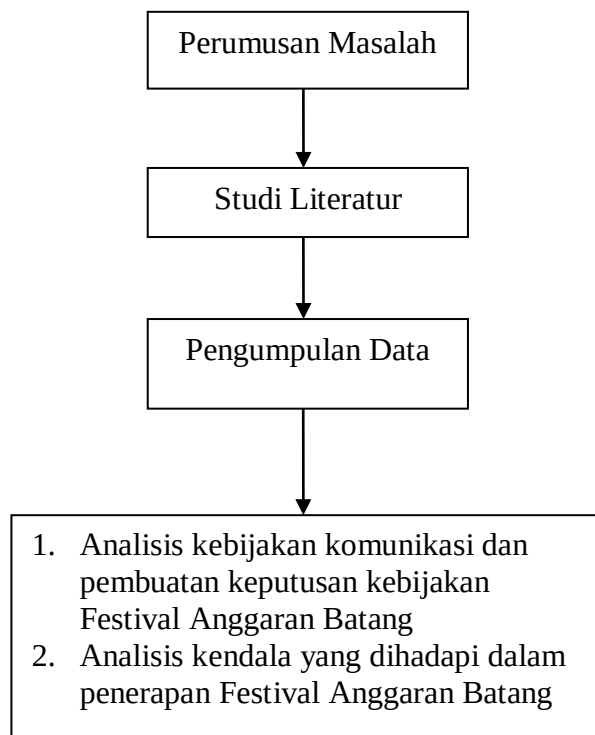
kebijakan publik oleh institusi pemerintahan.

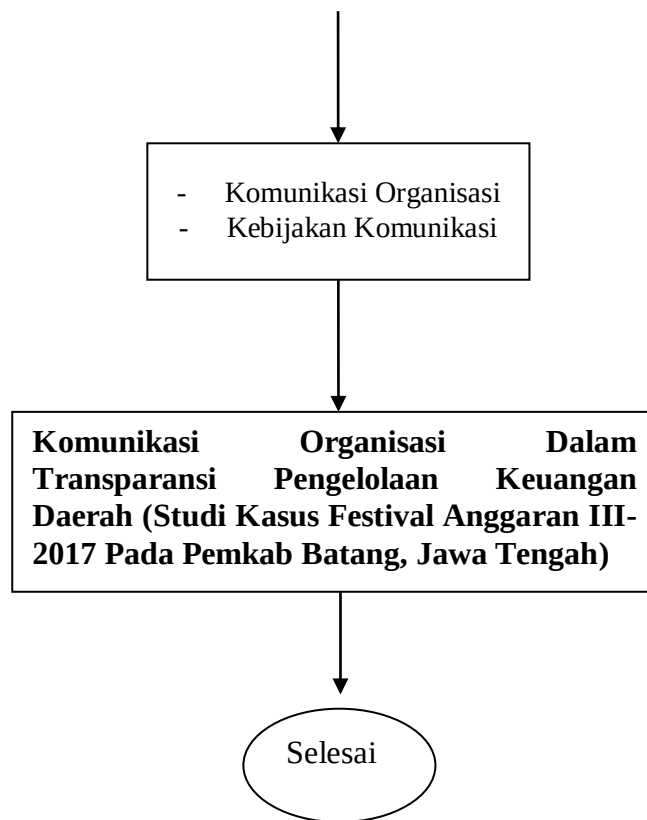
Peneliti menganalisis komunikasi organisasi dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah menyangkut FA Batang yang diharapkan dapat menjadi program rutin tahunan Pemkab Batang sebagai bagian upaya pemberantasan korupsi.

4.2 Alur Pikir Penelitian

Peneliti membuat alur pikir penelitian setelah merumuskan masalah penelitian, lalu mencari studi literatur dari beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini sebagai referensi, serta beberapa buku dan dokumen lainnya. Selanjutnya melakukan pengumpulan data melalui wawancara ke berbagai pihak selaku nara sumber yang relevan seraya melakukan pengamatan di lokasi. Tahap selanjutnya menganalisis kebijakan komunikasi dan pembuatan keputusan kebijakan komunikasi FA. Serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan FA Batang, sehingga dapat disimpulkan model komunikasi organisasi dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah (Studi kasus Festival Anggaran III-2017 pada Pemkab Batang, Jawa Tengah).

Alur pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 2:





Gambar 2. Alur Pikir Penelitian

4.3 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggambarkan suatu variabel, keadaan, fenomena atau gejala sosial tertentu. Pemilihan tempat dalam penelitian ini dilakukan secara purposive yaitu Pemkab Batang, Jawa Tengah yang mengadakan FA sejak 2013.

Sepanjang Indonesia merdeka, sepengetahuan peneliti belum ada pemerintah daerah maupun di tingkat pusat yang terbuka akan tata kelola anggaran melalui FA. Sebaliknya aparat mulai dari eksekutif, yudikatif hingga legislatif cenderung ‘menutup diri’ akan pengelolaan anggarannya. Lemahnya transparansi maupun lemahnya pengawasan dari pihak berwenang akan tata kelola anggaran, menyuburkan kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Tak bisa dipungkiri, melesatnya APBN maupun APBD pasca reformasi, menyebabkan bangsa ini ‘dikepung’ para koruptor yang secara sistemik dan berjamaah ramai-ramai memakan uang negara.

Usai meliput FA Batang 2016, peneliti tertarik mengkaji kebijakan komunikasi maupun bagaimana pembuatan kebijakan komunikasi yang dilakukan Yoyok dengan melibatkan jajarannya. Serta mengkaji kelangsungan FA pasca berakhirnya kepeimpinan Yoyok.

Peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus dengan tipe intrisik dan desain penelitian *single case holistic* yakni untuk mengungkapkan fenomena atau gejala sosial tertentu dari kebijakan FA sebagai inovasi Bupati Batang (2012-2017) untuk menerapkan transparansi secara langsung, terbuka dan dialogis. Komunikasi organisasi FA tersebut dikaji melalui proses kebijakan komunikasi, proses pembuatan kebijakan komunikasi serta kendala yang dihadapi Pemkab Batang dalam penerapan FA.

4.4 Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian adalah di Pemkab Batang, Jawa Tengah. Peneliti mengamati pelaksanaan Festival Anggaran III-2017.

4.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dikaitkan dengan permasalahan penelitian yakni

- a) Bagaimana komunikasi organisasi dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah dikaitkan dengan FA Batang.
- b) Apa kendala yang dihadapi Pemkab Batang dalam menerapkan kebijakan FA?

Peneliti mewawancarai Bupati dan jajaran Pemkab Batang terkait pelaksanaan FA. Serta kalangan DPRD, LSM anti korupsi, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pengunjung di Festival Anggaran. Penelitian ini dilakukan mulai Januari hingga Desember 2017. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi.

4.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis interpretif dan triangulasi data dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap subjek penelitian yang telah ditentukan. Analisis interpretif digunakan untuk menetapkan strategi kebijakan komunikasi organisasi melalui FA.

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan komunikasi dan pengambilan keputusan kebijakan komunikasi pada FA yang diadakan Pemkab Batang oleh Bupati Yoyok pada 2016, serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan festival tersebut yang sejatinya bertujuan memberantas KKN.

Sebagai Bupati Batang periode 2012-2017, Yoyok membangun modernisasi birokrasi, penguatan sipil dan kolaborasi yang berlandaskan komitmen, didukung pengawasan dan partisipasi publik. Antara lain inovasi pelayanan publik, pembangunan sistem *e-Government*, penerapan ISO 27001 untuk LPSE, evaluasi dan uji kelayakan proyek fisik oleh tim independen serta pendampingan Tim TP4 Kejaksaan. Penguatan sipil dilakukan dengan penguatan demokrasi desa dan Pilkades tanpa money politik.

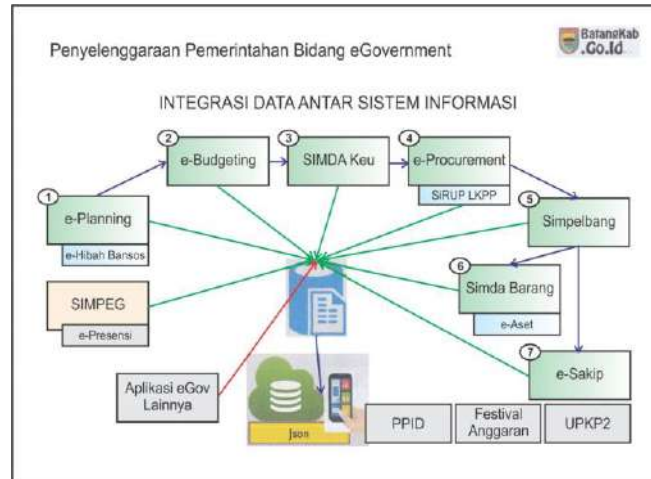
Ia mewajibkan seluruh PNS untuk membuat pakta integritas yang bertujuan mencegah dan menangkal KKN, memperkuat netralitas birokrasi dari pengaruh politik dan mengadakan lelang jabatan. Menggelar FA pada 2014 dan 2016. Berikut strategi Kepala Daerah yang diusung Yoyok Riyo Sudibyo selaku Bupati Batang (2012-2017):



Gambar 3. Strategi Kepala Daerah di era Yoyok Riyo Sudibyo

Menjawab tuntutan jaman serta seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi (IT), Yoyok menjalankan pemerintahan berbasis IT melalui

pembangunan sistem *e-government* terintegrasi. Berikut gambar penyelenggaraan pemerintahan di era Yoyok Riyo Sudibyo di bidang *eGovernment*:



Gambar 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang eGovernment

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, pelaksanaannya berfokus pada komunikasi organisasi melalui kebijakan komunikasi dan pembuatan keputusan kebijakan komunikasi FA, serta mengkaji kendala yang dihadapi Pemkab Batang dalam menerapkan kebijakan komunikasi pada FA.

Penelitian awal dilakukan saat peneliti meliput FA 2016 dan memperoleh data-data dari sejumlah nara sumber yang berkompeten. Meliputi Bupati Batang (2012-2017) Yoyok Riyo Sudibyo, Kepala Bagian Orda, Retno Dwi Irianto, serta wawancara dengan Bupati Tegal Ki Entus Sumarsono, dan pengunjung yang datang di festival tersebut.

Tahapan selanjutnya pada Mei dan Agustus 2017 peneliti mengkaji FA 2017 dengan mewawancarai Bupati Batang periode 2017-2022 Wihaji, Wakil Bupati Batang (2017-2022), Suyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nasikhin, Ketua DPRD Kabupaten Batang, Teguh Raharjo, Ketua UPKP2 Batang, Abdul Wahid, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Asri Hermawan dan Komifo Pemkab Batang.

Untuk kelengkapan data, peneliti menggunakan beberapa dokumen dari Pemkab Batang, studi pustaka dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian merupakan gambaran umum yang diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian.

5.1 Analisis Kebijakan Komunikasi

Kebijakan komunikasi merupakan rencana strategik dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan komunikasi dipengaruhi perkembangan sosial, politik dan ekonomi sebuah negara. Chakravartty dan Sarikakis (2006,7) dalam Abrar (2008:4) mengungkapkan kebijakan komunikasi memiliki konteks, domain dan paradigma. Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya, misalnya politik-ekonomi, politik komunikasi dan lainnya. Domain kebijakan komunikasi bermakna muatan nilai yang dikandung kebijakan komunikasi, seperti globalisasi, ekonomi global dan sejenisnya. Sedangkan paradigma berarti kerangka cita-cita dari kebijakan komunikasi yang dituju, seperti terbentuknya masyarakat informasi, menguatnya *civil society* dan sebagainya.

Secara keseluruhan muatan konteks, domain dan paradigma kebijakan komunikasi FA seperti yang diungkapkan Bupati Batang 2012-2017 Yoyok sebagai berikut:

“Pemerintah kini semakin berupaya mewujudkan *good governance*, salah satunya melalui transparansi informasi publik yang akurat dan memadai tentang pemerintah kepada publik untuk mencegah KKN. Berkaitan pengelolaan keuangan daerah, sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperlihatkan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Festival Anggaran sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban uang rakyat kepada rakyat yang selayaknya bisa menjadi agenda rutin untuk memberantas KKN, penguatan ekonomi daerah dan masyarakat Batang yang sejahtera. Karena rakyat bisa secara langsung bertanya tentang penggunaan anggaran ataupun program pembangunan kepada aparat, memberi masukan ataupun komplain. Dengan cara ini mendorong rakyat untuk ikut peduli dalam proses pembangunan.”¹

Bertolak dari hasil wawancara di atas, maka konteks FA dikaitkan dengan kebijakan komunikasi yakni politik komunikasi, yang mengandung domain

¹(*Ibid*, Yoyok Riyo Sudibyo)

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan partisipatif. Serta paradigma terwujudnya masyarakat informasi dalam pemerintahan yang bebas KKN seiring Reformasi 1998.

Kiprah Yoyok dengan mengadakan FA, menurut peneliti sudah tepat. Karena selama ini transparansi keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, hanya menyajikan data-data keuangan secara garis besar dan sifatnya satu arah di media massa. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi rinci dan jelas tentang penggunaan APBD maupun APBN. Diharapkan event tersebut seyogyanya dapat menjadi program rutin tahunan oleh Pemkab Batang untuk semakin mewujudkan *good governance*. Walaupun data-data keuangan ditampilkan secara *online*, dipastikan tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses informasi tersebut.

Kegiatan komunikasi juga merupakan kegiatan politik. Komunikasi menurut Barnlund (Nimmo, 2005:6) adalah suatu proses transaksi oleh individu dalam menciptakan dan memberi makna untuk menyadari tujuan individu tersebut. Komunikasi sebagai hal baku dalam fungsi organisasi yang diimplementasikan secara internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan bersama seraya mengubah perilaku.

Kebijakan komunikasi FA dilakukan melalui rapat dan sosialisasi yang berasal dari gagasan Bupati Yoyok. Semula komunikasi yang terjadi cenderung satu arah, namun berkembang menjadi komunikasi transaksi setelah Bupati Yoyok menjalin jaringan dengan berbagai pihak yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan anggaran bertujuan mencegah KKN, menimba ilmu maupun menyerap informasi. Di antaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Ombudsman RI, BPKP, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan lainnya. Dalam komunikasi transaksi lazimnya memang terjadi pertukaran gagasan, pengetahuan dan informasi.

Dalam menganalisis kebijakan komunikasi dilakukan dengan dua cara yakni *positive public policy* dan *normative analysis* (Cohcran dan Malone,1992:2) dalam Abrar (2008:12). Pada *positive public policy* menekankan proses kebijakan bekerja, sedangkan pada *normative analysis* (Cohcran,1992:4) lebih tertuju pada penilaian yang seharusnya tertuang dalam kebijakan.

Lasswell dalam Mulyana (2008:69) menyebutkan lima unsur dalam proses komunikasi yaitu sumber (pengirim pesan/komunikator), pesan (dapat berupa makna, bentuk atau simbol), saluran atau media yang digunakan pemberi pesan, penerima pesan (komunikan) dan efek. Model Laswell mendeskripsikan komunikasi berjalan searah atau linier yang menekankan aspek persuasi yang bertujuan memperoleh efek tertentu.

Komunikasi merupakan alat kekuasaan yang bermuara kepada kepentingan politik. Sumber atau komunikator politik berupaya mencari pengaruh melalui komunikasi (Nimmo,2005:31). Sebagai komunikator politik, politisi berada di posisi strategis untuk memainkan peran politik dalam suatu *setting* politik tertentu.

Dikaitkan dengan teori Laswell, maka proses kebijakan komunikasi FA secara umum yakni Bupati Yoyok yang didukung sejumlah partai politik, selaku komunikator menyampaikan gagasan/ide untuk membuka akses luas di bidang pengelolaan anggaran secara utuh, terbuka, dialogis dan langsung. Hal ini diwujudkan dalam bentuk FA yang semula melalui selebaran dan rapat-rapat lalu ditingkatkan menjadi dalam bentuk stand secara indoor dan partisi yang melibatkan 4 komponen/bidang. Pelaksanaan FA berlokasi di lingkungan Pemkab Batang, dengan pesan kebijakan mewujudkan transparansi penggunaan anggaran APBD. Komunikan meliputi jajaran Pemkab Batang, masyarakat, DPRD, institusi pemerintah dan LSM anti korupsi. Efek yang diharapkan dapat membangun kepercayaan publik, menutup peluang KKN dan menjadi media pembelajaran bagi daerah lain.

Untuk lebih jelasnya, proses kebijakan komunikasi FA Batang dibuat dalam tabel:

Tabel 1 Proses Kebijakan Komunikasi Festival Anggaran Batang 2014-2016

Komunikator	Pesan	Saluran	Komunikan	Efek
Bupati Batang (2012-2017) Yoyok Riyo Sudibyo Lokasi: Pemkab Batang, Jawa Tengah	1. Transparansi penggunaan APBD secara terbuka, langsung dan dialogis. 2. Mencegah KKN. 3. Mendukung era informasi publik sesuai UU KIP dan UU Pemerintah tentang <i>good governance</i>	1. Festival Anggaran 2. Rapat 3. Sosialisasi 4. Diskusi 5. Jumpa pers 6. Iklan di media massa	1. PNS Pemkab Batang 2. DPRD 3. Institusi pemerintah 4. LSM 5. Masyarakat 6. Profesional	1. Masyarakat mulai kritis terhadap pembangunan yang tidak sesuai yang diumumkan. 2. Adopsi kebijakan oleh pemerintah daerah dan institusi pemerintah

Analisis kebijakan komunikasi berdasarkan *normative policy* dikaitkan dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam hal ini sesuai kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan mengikis maupun menutup celah peluang segala bentuk korupsi di segala lini yang diduga dilakukan oknum aparat. Serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

5.1.1 Analisis Pembuatan Keputusan Kebijakan Festival Anggaran

FA yang digagas Bupati Yoyok merupakan kebijakan publik bertujuan membangun tradisi yang komunikatif antara Pemkab dan masyarakat dalam pengelolaan anggaran secara proporsional dan profesional. Proses kegiatan ini pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis ini diimplementasikan dalam proses pembuatan kebijakan. Sebuah isu/realitas sosial/problematis masuk menjadi agenda dan kebijakan komunikasi merupakan suatu proses dengan skala politik sangat tinggi.

Dunn (2003:22-23) menguraikan proses pembuatan kebijakan publik dalam lima tahapan yang saling bergantung diatur menurut urutan waktu sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda; pada tahap ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.
2. Formulasi kebijakan; masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
3. Adopsi kebijakan; alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan; kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia.
5. Evaluasi kebijakan; unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

1. Tahap penyusunan agenda menurut Subarsono (2005:11) dalam Abrar (2008:47) ada tiga kegiatan yang harus dilakukan yakni 1) membangun persepsi di kalangan stakeholders tentang persoalan yang harus diselesaikan, 2) membuat batasan masalah 3) memobilisasi dukungan agar suatu persoalan masuk dalam agenda pemerintah.

Bertolak dari Festival Anggaran, Yoyok menguraikan sebagai berikut:
 “Sesuai janji saya kepada rakyat, maka setiap tahun saya akan melaporkan langsung hasil kerja saya kepada rakyat, selain laporan normatif ke DPRD. Dengan cara ini saya ingin membangun partisipasi publik. Pelaksanaan Festival Anggaran juga dimaksudkan sebagai rangkaian peringatan HUT Kabupaten Batang pada Februari. Sejak Indonesia merdeka, baru Kabupaten Batang yang mengadakan kegiatan ini.”²

Dengan kata lain FA menjadi agenda yang dilakukan Pemkab Batang sebagai realisasi ide dari Bupati Yoyok, sekaligus merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kabupaten Batang. Yoyok berupaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipasi publik. Terlebih didasari dari pengalaman bupati sebelumnya yang terjerat kasus korupsi APBD dan semakin merebaknya budaya koruptif di kalangan kepala daerah seiring pasca Reformasi. Termasuk menjamurnya kasus-kasus korupsi di legislatif dan yudikatif. Untuk itu ia membangun persepsi di kalangan jajaran Pemkab, DPRD,

²(*Ibid*, Yoyok Riyo Sudibyo)

LSM anti korupsi, birokrat dan masyarakat terkait mencegah praktek KKK di Pemkab Batang dengan menginformasikan penggunaan APBD secara langsung, terbuka dan dialogis kepada masyarakat.

Agar gagasan untuk membuka akses publik seluas-luasnya terkait penggunaan anggaran dapat lebih fokus, Yoyok membatasinya dengan menginformasikan kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya dan rencana program pembangunan yang akan dikerjakan. Serta memobilisasi dukungan dari DPRD, LSM anti korupsi, birokrat, masyarakat maupun PNS setempat dalam menjadikan FA sebagai kegiatan rutin tahunan atau dua tahun yang dibiayai APBD.

2. Tahap formulasi kebijakan komunikasi: pada hakekatnya formulasi kebijakan komunikasi erat kaitannya dengan sistem komunikasi yang berlaku dalam suatu negara (Abrar,2008:48). Jika sistem komunikasi yang dianut sebuah negara adalah sistem komunikasi yang mendorong terciptanya masyarakat informasi, maka konteks perumusan kebijakan komunikasi adalah masyarakat informasi.

Kiprah Yoyok melalui kebijakan FA bertujuan membuka akses informasi publik akan tata kelola APBD agar diketahui publik dalam mendukung era masyarakat informasi. Jones (1996:47) dalam Tahir (2014:25) berpendapat kebijakan merupakan keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi kebijakan tersebut.

Kebijakan komunikasi merupakan peraturan yang bersifat praktis. Sebagai konsekuensinya, formulasi kebijakan komunikasi selayaknya menjadi peraturan yang aplikatif. Kebijakan komunikasi menurut Topatimasang (2000:41) sebagai satu sistem hukum yang memiliki tiga aspek yakni 1) isi hukum yang terkandung dalam kebijakan komunikasi misalnya Undang-Undang, Surat Keputusan dan Peraturan Daerah, 2) struktur hukum yang bermuara pada komitmen pelaksana kebijakan komunikasi terhadap implementasi kebijakan tersebut, 3) budaya hukum yang mencermati reaksi masyarakat terhadap isi dan implementasi kebijakan komunikasi.

Formulasi kebijakan dibahas dalam rapat panitia FA 2016 diketuai Sekda Batang, Nasikihin dengan penanggungjawab Bupati Yoyok. Berkaitan manakala ada masalah, panitia melaporkan ke bupati untuk dicari solusinya.

Asisten I Sekda Batang, Retno Dwi Irianto kepada peneliti menjelaskan untuk menyukkseskan FA Batang 2016, Bupati Batang Yoyok membentuk tim kepanitiaan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Adapun untuk pelaksanaan FA Batang khususnya 2014 dan 2016, Bupati Yoyok tidak menerbitkan SK Bupati, ataupun Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah (Perda). Namun merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan di masing-masing SKPD dan UKPD yang menginduk pada program bupati sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.

Berikut wawancara peneliti dengan Retno Dwi Irianto:

“Untuk pelaksanaan Festival Anggaran Batang 2016 secara spesifik tidak ada SK Bupati, Peraturan Bupati ataupun Perda. Karena pada dasarnya hal ini merupakan pelaksanaan program kerja. Dikaitkan Festival Anggaran 2016 dahulu masuk dalam Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang kini berganti menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Anggaran tersebut untuk membiayai tempat dan infrastruktur pendukung.”³

Bertolak pada struktur hukum dikaitkan dengan komitmen pelaksana kebijakan komunikasi yakni diimplementasikan oleh Yoyok dan jajarannya dengan mengadakan FA. Diawali dari pola sederhana pada 2013 dengan membagikan brosur, selebaran hingga rapat akbar yang ternyata tidak efektif. Tahun berikutnya ditingkatkan dalam bentuk formasi stand dan pada 2016 FA lebih sistematis dan tertata yang dibagi dalam empat kelompok.

Terkait budaya hukum berupa reaksi masyarakat akan isi dan implementasi kebijakan komunikasi FA Batang, dalam wawancara peneliti kepada sejumlah pengunjung pada FA Batang 2016, mayoritas pengunjung menyambut antusias dan mendukung event yang tergolong langka itu. Berhubung belum pernah ada pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat yang sebelumnya menggelar Festival Anggaran sejak Indonesia merdeka. Pengunjung setuju transparansi anggaran

³(Sumber: hasil wawancara peneliti dengan Asisten I Sekda Batang pada 3 Oktober 2017)

tersebut sehingga mereka bisa mengetahui langsung dan detil akan program pembangunan yang sudah berlangsung, sedang dan yang akan dikerjakan. Artinya mereka dapat mengetahui langsung tata kelola penggunaan anggaran daerah untuk meminimalisir bahkan mencegah potensi korupsi. Hanya sebagian kecil pengunjung yang menolak diadakannya FA karena menilai pemborosan anggaran dan cukup dipublikasikan secara online melalui website Pemkab Batang.

Reaksi positif maupun apresiasi akan FA Batang juga berdatangan mulai kalangan birokrat, KPK, Ombudsman hingga LSM anti korupsi seperti FITRA, TII, dan ICW. Deputy Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Bidang Pelayanan Publik, Mirawati Sudjono mengapresiasi FA Batang yang merupakan inovasi pelayanan publik dan daerah lain dapat belajar ke Batang. Sehingga tepat dilombakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Bahkan inovasi tersebut dinilai sukses memosisikan rakyat hingga lapisan terbawah memiliki pengawasan yang kuat terhadap APBD. (<https://news.detik.com/berita/3163670/festival-anggaran-pemkab-batang-tuai-apresiasi-daerah-lain-diminta-meniru>). FA Batang menurut Sekjen TII, Dadang Tri Sasangoko dapat menjadi kebijakan pemerintah pusat sehingga masyarakat dapat mengetahui apapun alokasi anggaran yang digulirkan. Konsep FA ini dapat dilakukan daerah lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. (<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/06/langkah-bupati-batang-selenggarakan-festival-anggaran-bisa-jadi-kebijakan-nasional>)

3. Tahap adopsi kebijakan; Bupati Yoyok mengklaim pelaksanaan buka-bukaan anggaran tersebut mendapat dukungan dari kalangan legislatif, selain dari masyarakat, birokrat, profesional dan LSM anti korupsi seperti FITRA, ICW dan TII. Serta diapresiasi oleh KPK, Ombudsman, BPK dan FA Batang 2014 Yoyok mendapat penghargaan Bung Hatta Awards terkait tata kelola pemerintahan yang transparan.

Pada FA Batang 2016 dilakukan dengan menyempurnakan FA 2014 dan tidak lagi dilakukan dengan menyebarkan brosur, selebaran, ataupun mengundang sosialisasi RT-RW, dan perangkat desa hingga camat.

Hal ini seperti dikatakan Kabag Organisasi Setda Batang, Retno Dwi Irianto yang juga sebagai Wakil Ketua IV dalam susunan keanggotaan tim FA 2016:

“Gagasan pak bupati untuk penyelenggaraan Festival Anggaran 2016 tetap mengacu pada Festival Anggaran 2014 namun lebih terarah dan lebih fokus. Pada Festival Anggaran 2014 mulai menggunakan event organizer namun belum sistematis. Pada Festival Anggaran 2016, kami tetap menggunakan event organizer sesuai aturan dengan biaya APBD dan sebagian dari pihak swasta melalui dana CSR. Dalam Festival Anggaran 2016, kami menampilkan kegiatan pembangunan 2014 dan 2015 serta rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pada 2016 yang menampung masukan atau aspirasi masyarakat.”⁴

4. Tahap implementasi kebijakan: Pada FA 2016, kegiatan difokuskan dalam 4 bidang seperti yang dijelaskan Ketua Panitia FA Batang 2016 yang juga Setda Batang, Nasikhin:

“Festival Anggaran 2016 fokus pada 4 komponen yakni bidang pengelolaan keuangan daerah, bidang pembangunan infrastruktur urusan wajib/pelayanan dasar, bidang pelaksanaan pelayanan publik dan bidang penyelenggaraan pembangunan desa. Jadi pengelompokkannya tidak menurut jumlah SKPD. Tenda pameran indoor dengan partisi, anggaran APBD sebesar Rp381 juta yang berasal dari DPA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang. Selama 3 hari diisi dengan serangkaian acara seperti seminar nasional dan diskusi publik serta hiburan dan wayang. Hal yang menjadi primadona karena pengunjung bisa melihat sendiri gaji bupati dan wakil bupati serta Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD selain pengelolaan APBD sesuai 4 komponen dari masing-masing stand.”⁵

5. Tahap evaluasi kebijakan; Evaluasi merupakan kegiatan yang menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat tentang objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2012:7). Evaluasi sebagai proses yang bertujuan memastikan tindakan strategik sudah sesuai atau tidak dengan rancangan awal atau perumusan strategik yang ditetapkan.

⁴(Sumber: hasil wawancara peneliti pada 16 Maret 2016)

⁵(Sumber: hasil wawancara peneliti pada 16 Maret 2016)



Gambar 5. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini didampingi Bupati Batang (2012-2017) Yoyok Riyo Sudibyo saat Festival Anggaran Batang 2016 di samping kantor Pemkab Batang di Jl Veteran. (dokumentasi peneliti)

Koordinasi dari tim panitia yang tidak kompak sehingga pelaksanaan FA 2016 berlangsung tidak sesuai dengan target awal yakni pada Februari, tapi diadakan selama 3 hari sejak 13 Maret 2016.

Keterlambatan pelaksanaan FA 2016 diakui Bupati Yoyok karena koordinasi yang kurang cermat dari panitia. Berikut pernyataan Yoyok:

“Koordinasi yang kurang cermat di antara panitia sehingga menyebabkan acara molor. Hal ini karena adanya lintas koordinasi antar SKPD, EO, LSM dan pihak terkait lainnya. Mengatasi kendala ini dengan meningkatkan koordinasi dan dukungan semua SKPD, instansi vertikal dan unsur masyarakat.”⁶

FA Batang tak bisa dipungkiri merupakan inovasi dalam pelayanan publik. Pelaksanaannya mengacu Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 yang mengatur keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperlihatkan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Serta UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan keuangan

⁶(Opcit, Yoyok Riyo Sudibyo)

sebagai salah satu informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Badan Publik.



Gambar 6. Seorang ibu menggendong anaknya melihat gaji bupati saat Festival Anggaran Batang 2016 yang diadakan Bupati Batang (2012-2017) Yoyok Riyo Sudibyo. (dokumentasi peneliti)

FA sebagai ide Bupati Yoyok Riyo Sudibyo. Rogers (1995) menyebutkan inovasi dapat berupa ide, gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. (<https://wsmulyana.wordpress.com/tag/everett-m-rogers/>). Inovasi berperan penting dalam mengawali perubahan sosial yang menjadi episentrum pada pembangunan masyarakat. Proses pengambilan keputusan inovasi meliputi tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi.

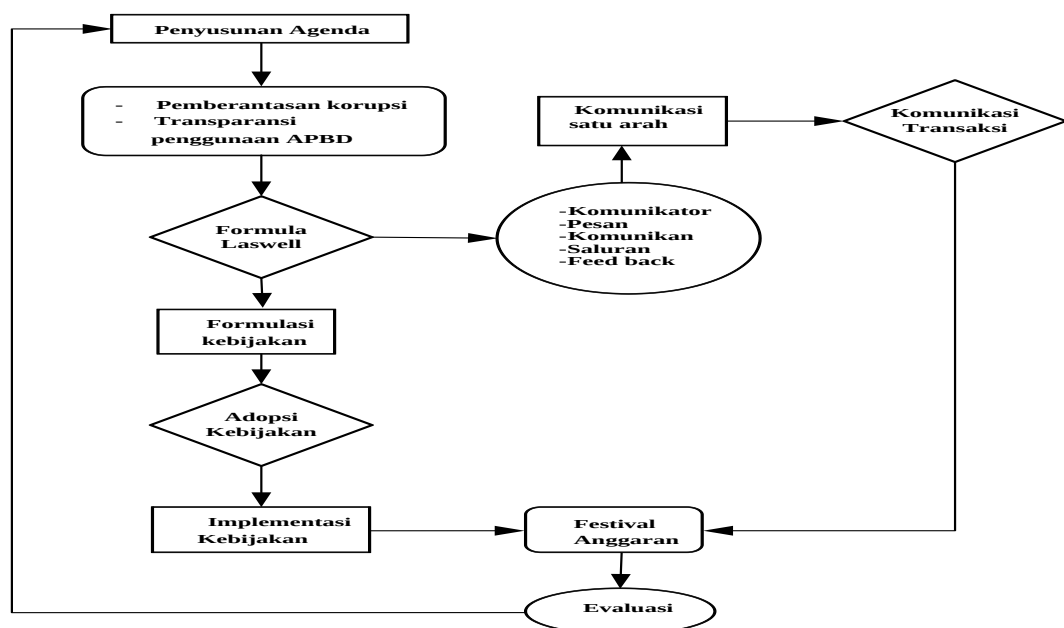


Gambar 7. Petugas Kecamatan Lumpung, Pemkab Batang menunjukkan penggunaan anggaran 2015 dalam Festival Anggaran Batang 2016. (dokumentasi peneliti)

Proses pembuatan keputusan kebijakan FA Batang dimaknai melalui proses difusi pengetahuan berdasarkan persepsi komunikator yakni Yoyok selaku Bupati Batang dengan mengkomunikasikan ide ke jajarannya untuk secara transparans melaporkan langsung kepada rakyat tentang pertanggungjawaban APBD. Ide dasar FA yang semula dilakukan dalam format sederhana seperti menyebar selebaran di tempat-tempat umum, rapat akbar dengan tokoh masyarakat tapi hasilnya tidak optimal. Selanjutnya komunikator mencari informasi dengan berbagai pihak berkompeten untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan transparansi penggunaan anggaran. Berbagai masukan, didukung SDM, teknologi dan anggaran yang memadai, konsep transparansi publik terkait pengelolaan APBD direalisasikan dengan mengadakan FA 2014 dan 2016.

Pelaksanaan FA berhubungan erat dengan peranan komunikasi oleh komunikator khususnya dalam hal persuasi maupun memengaruhi orang lain. Intinya, upaya komunikasi Yoyok merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan kekuasaan saat menjabat Bupati Batang periode 2012-2017 dengan melaksanakan FA.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka model komunikasi Festival Anggaran Batang dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



**Gambar 8 : Model Komunikasi Festival Anggaran Batang
(Sumber: Rachmi Kurnia Siregar)**

5.1.2 Kendala Dalam Penerapan Kebijakan Komunikasi Festival Anggaran

Seperti telah dijelaskan sebelumnya kebijakan komunikasi bersifat politis dan rentan terjadi konflik kepentingan di masa mendatang. FA Batang telah menginspirasi sejumlah pemerintah daerah untuk mengadopsi terkait pertanggungjawaban keuangan negara secara rinci, terbuka dan dialogis. Kegiatan ini sejatinya masuk menjadi visi Kabupaten Batang sesuai RPJPD 2005-2025 yakni Batang yang sejahtera, maju, mantap dan mandiri berbasis potensi unggulan.

Seiring berakhirnya kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo (Februari 2012-2017) dan digantikan Wihaji yang mulai bertugas pada Mei 2017-2022, FA Batang tidak ada lagi.



Gambar 9: Bupati Batang (2017-2022), Wihaji (dokumentasi peneliti)

Padahal sebelumnya FA Batang banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan mulai pejabat pemerintah, legislatif, LSM anti korupsi dan masyarakat. Batang menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi di bidang penggunaan APBD. Sejumlah pemerintah daerah meniru *event* tersebut, di antaranya Pemkab Karang Anyar pada Mei 2016 dan Oktober 2017 menampilkan pertanggungjawaban anggaran tahun berjalan.



Gambar 10: Festival Anggaran oleh Pemkab Karanganyar pada Oktober 2017. (sumber: <https://www.fokusjateng.com/2017/10/28/festival-anggaran-pemkab-karanganyar-jadi-sorotan-legislasi/>)

Di tingkat pusat, konsep FA Batang diadopsi Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan RI yang mengadakan *Innovation in public services through open data* pada Maret 2017. Event ini memamerkan data-data komponen APBN (portal data) yang bisa diunduh masyarakat serta sosialisasi gerakan literasi APBN. (sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1262>)



Gambar 11. Festival Anggaran ala Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan yang menampilkan Portal Data APBN pada 22 Maret 2017 di Jakarta. (sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1262>).

Kepala BPPKAD Kabupaten Batang, Asri Hermawan mengatakan seiring pergantian kepala daerah, FA Batang 2017 ditiadakan. Namun spirit untuk menjalankan transparansi untuk informasi publik tetap diterapkan melalui penerapan *e-government* dan diperkuat dengan *smart city*.

Bagaimana dengan FA Batang 2018? Berikut jawaban Asri Hermawan kepada peneliti:

“Kami sudah menganggarkan dana sekitar Rp600 juta untuk membiayai event semacam Festival Anggaran pada 2018, namun akan dilakukan melalui sarana yang lebih murah misalnya dengan memasang iklan di media massa, TV, radio dan media sosial. Format detilnya tentu harus dibahas di tingkat pimpinan dan koordinasi dengan DPRD. Masyarakat tetap dapat bisa mengakses informasi pembangunan termasuk anggaran secara online melalui website Pemkab Batang, ataupun bisa melihat langsung videotron di alun-alun yang menampilkan berbagai program pembangunan Kabupaten Batang secara keseluruhan.”⁷

⁷(Sumber: Wawancara peneliti dengan Kepala BPPKAD Asri Hermawan pada 22 Mei 2017)

Bupati Batang Wihaji (2017-2022) kepada peneliti mengatakan sebagai berikut:

“Sebagai kepala daerah yang dipercaya rakyat, saya akan meneruskan program atau kebijakan pimpinan sebelumnya. Mana yang bagus ya monggo silahkan diteruskan, seperti pembangunan inovasi pelayanan publik berbasis *e-government* dan kini kami perkuat dengan *smart city*. Adapun untuk Festival Anggaran yang digagas pak Yoyok, saya akan menggunakan dengan cara lain kan tidak mesti sistemnya harus sama. Saya tidak maruk *award* (penghargaan) karena tidak mengadakan Festival Anggaran. Saya juga tidak khawatir *branding* Kabupaten Batang akan anjlok karena tak lagi ada Festival Anggaran dan saya tidak butuh pencitraan. Karena saya lebih memprioritaskan pembangunan mendasar antara lain pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk rakyat saya agar sejahtera.”⁸

Terkait kendala biaya, Wihaji menampiknya. Ia berpendapat anggaran tidak menjadi masalah sepanjang kegiatan tersebut memang tepat dan dibutuhkan masyarakat Batang. Namun ia menolak menyebutkan sistem apa yang akan diterapkan sebagai pengganti FA, karena mengaku sedang memperkuat konsolidasi internal di jajaran setelah Mei dilantik.

Bahkan ia mengeluarkan pernyataan yang bersifat ambigu sebagai berikut:

“Saya bertugas 5 tahun ke depan. Siapa tahu di tahun depan atau tahun selanjutnya bakal ada lagi pola semacam Festival Anggaran jika memang masyarakat mendesak dan didukung wakil rakyat.”⁹

Dengan tidak adanya lagi FA Batang menggambarkan inkonsistensi Pemkab Batang dan semakin memperkuat paradigma dalam masyarakat yakni ganti pimpinan, ganti pula kebijakan.

Sebagian pengunjung saat diwawancarai peneliti sangat mengapresiasi FA sebagai bagian untuk mencegah dan memberantas KKN di pemerintah daerah dan memperkuat reformasi birokrasi. Bahkan pengunjung berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda rutin sebagai pembelajaran bagi masyarakat terkait pengelolaan penggunaan anggaran. Serta sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pembangunan.

⁸(Sumber: Wawancara peneliti dengan Bupati Wihaji pada 21 Agustus 2017)

⁹(Ibid, Wihaji)



Gambar 12. Pengunjung di Festival Anggaran Batang 2016. (dokumentasi peneliti)

Lebih dari itu warga Kecamatan Batang tetap menghendaki FA penting untuk dilaksanakan dan menjadi program rutin karena bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap APBD, meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan (Aziz,2016).

Dikaitkan dengan reformasi birokrasi yang dilancarkan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo untuk pemberantasan korupsi dinilai sudah jauh lebih baik (Ahmad,2016). Tapi diperlukan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia khususnya kualitas birokrasi agar mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan profesional yang berkelanjutan.

Wakil rakyat dalam hal ini Ketua DPRD Batang, Teguh Raharjo mendukung FA Batang diadakan mengingat azas manfaat dari kegiatan tersebut yang dinilai tidak optimal. Selain itu di saat era digital yang didukung perkembangan teknologi dan informasi, informasi akan penggunaan anggaran APBD dan program-program pembangunan dapat diakses masyarakat melalui website Pemkab Batang. Anggaran dari kegiatan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat antara lain pendidikan, ekonomi, kesehatan dan mendukung sektor pariwisata.



Gambar 13. Ketua DPRD Batang, Teguh Rajarjo (dokumentasi peneliti)

Berikut petikan wawancara dengan Ketua DPRD Batang, Teguh Raharjo:

“Saya setuju Festival Anggaran Batang tahun ini tidak ada lagi, karena untuk transparansi anggaran bisa tanpa festival tapi bisa dengan banyak cara. Kegiatan Festival Anggaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih urgent sifatnya. Misalnya untuk membiayai sektor pendidikan, usaha kecil, kesehatan bagi warga miskin maupun mendorong sektor pariwisata sehingga pariwisata Batang dapat berkembang dan mendulang pendapatan asli daerah (PAD. Namun jika pada kenyataannya mayoritas masyarakat menghendaki supaya Festival Anggaran diadakan kembali, kami selaku pihak legislatif akan mendorong eksekutif untuk mengusahakannya.”¹⁰

¹⁰(Sumber: wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Batang di kantor Ketua DPRD Batang pada 18 Mei 2017)

Wakil Bupati Batang periode 2017-2022, Suyono juga setuju dihapusnya FA dari agenda rutin Pemkab Batang. Alasannya di era digital, masyarakat dapat mengakses langsung program pembangunan yang dijalankan Pemkab Batang termasuk menyangkut penggunaan APBD melalui website: <https://batangkab.go.id/>. Sehingga dana FA bisa digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat antara lain untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan Wakil Bupati Batang periode 2017-2022:

“Secara khusus saya tidak ingin terjebak dalam pencitraan, karena Festival Anggaran menurut saya sarat akan pencitraan.”¹¹

Meski menyayangkan tidak adanya lagi FA Batang, namun Ketua Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) Batang, Abdul Wahid berharap jajaran Pemkab Batang dipimpin Bupati Wihaji dapat mempertahankan *performance* yang sudah baik untuk dilanjutkan demi memajukan kawasan Batang melalui berbagai inovasi. Sejatinya FA bisa dilakukan di mulai di tingkat desa, kelurahan, kabupaten dan di jenjang selanjutnya tentang penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban. Kiprah ini menjadi akses masyarakat untuk mengetahui pengelolaan anggaran oleh birokrat.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan Kepala UPKP2 Batang:

“Format Festival Anggaran jika pun tidak diadakan lagi dapat dirubah atau disederhanakan. Hal terpenting spirit untuk membangun kinerja birokrat mengacu akuntabilitas, transparan dan partisipatif. Masyarakat sebagai pemanfaat dan pengawas jalannya pembangunan. Adanya keterbukaan kinerja aparat sehingga membangun partisipasi publik yakni munculnya feed back positif dari masyarakat. Serta keterbukaan akan usulan masyarakat terhadap program pembangunan. Pada hakekatnya Festival Anggaran sebagai wahana untuk membangun spirit bersama dari para stakeholder dan membangun jalur interaksi sosial masyarakat dengan pamong. Jika mengandalkan transparansi publik khususnya menyangkut soal penggunaan anggaran berbasis IT, tidak semua masyarakat memiliki

¹¹(Sumber: wawancara peneliti dengan Wakil Bupati Batang periode 2017-2022 di Batang pada Mei 2017)

akses IT dan belum tentu semua masyarakat sudah melek IT. Ini hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak eksekutif.”¹²

Asisten I Setda Batang, Retno Dwi Irianto menjelaskan walaupun FA Batang tahun ini tidak ada, namun spirit dalam mewujudkan transparansi anggaran tetap diterapkan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat *e-government* mulai *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement* dan lainnya. Sistem tersebut sudah diterapkan saat pemerintahan Bupati Yoyok, namun mulai awal 2017 program ini lebih dimatangkan dan diperkuat dengan *Smart City* dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat dengan mengakses website Pemkab Batang (<https://batangkab.go.id/>).

Retno mengatakan Festival Anggaran sebagai inovasi Bupati Yoyok Riyo Sudibyo untuk mengangkat transparansi tata kelola penggunaan anggaran, serta evaluasi birokrasi yang pada akhirnya bertujuan menciptakan *clean government*.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan Asisten I Sekda Batang, Retno Dwi Irianto:

“Pada pemerintahan bupati saat ini memang tidak ada lagi Festival Anggaran, karena menilai dengan sistem *e-government* yang dapat setiap saat diakses masyarakat. Sehingga sistem pelayanan publik berbasis IT inilah yang kami perkuat. Artinya jika pelaksanaan sama (Festival Anggaran) berarti tidak ada perubahan. Meski Batang tidak lagi mengadakan Festival Anggaran, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kami menjadi rujukan atau studi banding bagi sejumlah pemerintah daerah yang belajar tentang *e-government* dan alih sistem *e-government*. Setiap hari dari sejumlah pemerintah daerah belajar tentang *e-government* mulai *e-planning*, *e-budgeting* dan lainnya.”¹³

Langkah kepemimpinan Bupati Batang 2017-2022 yang hanya mengandalkan layanan digital untuk diakses masyarakat sehingga dapat mengetahui ihwal pengelolaan APBD maupun program pembangunan lainnya, dinilai tidak tepat. Hal ini diasumsikan belum semua masyarakat mampu

¹²(Sumber: wawancara peneliti dengan Ketua UPKP2 Batang di Kantor UPKP2 Batang pada 17 Mei 2017. UPKP2 merupakan LSM anti korupsi yang dibentuk Bupati Batang periode 2012-2017 Yoyok Riyo Sudibyo untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Batang)

¹³(Sumber: wawancara peneliti dengan Asisten I Sekda Batang, Retno Dwi Irianto pada Oktober 2017 melalui telepon)

mengakses website Pemkab Batang, serta belum seluruh masyarakat memiliki perangkat memadai (handphone ataupun komputer yang terkoneksi internet).

Dengan hanya memantau secara *online*, tidak ada interaksi langsung antara masyarakat dengan birokrat, khususnya dengan jajaran Pemkab Batang. Padahal interaksi dan dialog langsung masyarakat dengan kalangan birokrat diyakini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya dan pemerintah secara umum.

Kepala Seksi Dinas Kominfo Pemkab Batang, Novia Ekawati menjelaskan sejak awal 2016 Pemkab Batang di era Yoyok mulai menerapkan *e-planning*, *e-budgeting* dan lainnya. Sistem ini pada 2017 disempurnakan dengan menggunakan program *Smart City*. Sebelumnya pada 2015 Pemkab Batang juga sudah menerapkan *e-lelang* mengacu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan implementasi manajemen yang mendapat pengakuan ISO.

Mengenai kendala yang dihadapi masyarakat Batang dalam mengakses internet, Novia mengakui sebagian kawasan di Batang memang dikenal sebagai *blank spot area* untuk internet. Hasil survei Diskominfo pada Maret 2017 memprediksi 10% dari 240 desa yang belum terkoneksi internet. Terutama desa-desa di pegunungan dan berada terjauh dari Pemkab Batang, misalnya saja Desa Kebaturuan, Kalirejo, Gringgingsari, Sodong, Peranten dan Silurah. Sebagai solusinya, Diskominfo berkonsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi hambatan tersebut.

Diskominfo Pemkab Batang juga aktif melatih masyarakat untuk melek IT. Berikut petikan wawancara peneliti dengan Novia Ekawati:

“Kami memiliki bagian pemberdayaan masyarakat untuk melatih masyarakat supaya melek IT dan menjadi kader informasi atau kelompok masyarakat melek informasi. Ada 6 kelompok masyarakat di 6 desa yang kami latih, desa tersebut sudah terkoneksi internet. Antara lain Desa Tambak Boyo, Pandan Sari, Rejosari Barat, Subah dan Limpung. Kegiatan ini merupakan aspirasi masyarakat mulai mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, pelaku usaha dan lainnya yang minta diadakan pelatihan IT sejalan dengan era digital.”¹⁴

¹⁴(Sumber: wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Dinas Kominfo Pemkab Batang, Novia Ekawati di kantor Pemkab Batang pada 17 Mei 2017)

Kota maupun kabupaten merupakan modal utama dalam globalisasi ekonomi, sehingga harus mampu memiliki keunikan, mempertegas identitas atau karakteristik khusus agar mampu bersaing. Hal tersebut penting sebagai entitas politik maupun ekonomi. Identitas suatu kota/kabupaten juga bertujuan meningkatkan harkat masyarakatnya. (Rainisto,2009) dalam Yananda dan Salamah (2014:41).

Keunggulan berbasis identitas di provinsi/kota/kabupaten sejalan dengan kepentingan masyarakat dan menjadi modal keunggulan kompetitif (*city branding*) karena mampu memperkuat diferensiasi. Selain bertujuan meningkatkan kualitas hubungan masyarakat dengan kawasan (provinsi/kota/kabupaten), *city branding* dapat menarik investor untuk berinvestasi sehingga mampu meningkatkan penanaman modal, turis, hingga potensi sumber daya manusia yang handal.

Bertolak dari hal di atas, sejatinya FA Batang yang sudah dilakukan sejak 2013, serta mulai terstruktur pada 2014 dan 2016 dapat dipertahankan sebagai kegiatan rutin Pemkab Batang untuk semakin menggelorakan otonomi daerah. Sehingga menjadi ciri khas (*branding* kabupaten) yang membedakan dengan pemerintah kabupaten lainnya, bahkan dalam skala nasional sekalipun. Festival Anggaran dapat dilakukan dua tahun sekali atau setidaknya sekali dalam masa kepemimpinan seorang bupati dalam berbagai format.

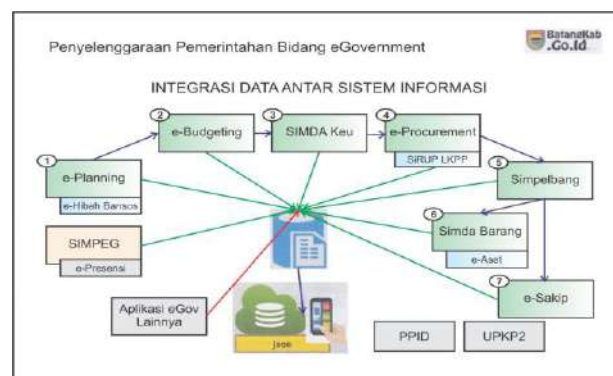
5.2 Temuan Penelitian

Seperti telah dijelaskan di atas, dengan berakhirnya kepemimpinan Bupati Yoyok Riyo Sudibyo dan digantikan Wihaji, FA Batang tidak ada lagi. Asisten I Setda Batang, Retno Dwi Irianto menjelaskan FA hanya merupakan instrumen sehingga bukan prioritas. Instrumen yang dimaksud sebagai terobosan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang penggunaan APBD. Upaya ini bertujuan mendorong reformasi birokrasi yang direalisasikan dengan memperkuat budaya kerja di kalangan Pemkab Batang untuk memberantas KKN disertai penyelenggaraan pemerintahan bidang *e-Government*.

Rangkaian *e-Government* ini diawali dari *e-planning*, *e-budgeting*, SIMDA Keu (Sistem Informasi Manajemen Daerah), *e-procurement*, Simpelbang (Sistem Informasi Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan), Simda Barang (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Barang Milik Daerah, e-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan lainnya. Serta mempertahankan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UPKP2 sebagai lembaga adhoc bentukan Yoyok sebagai sarana pengaduan masyarakat yang bertujuan menyelesaikan masalah seraya mengawasi pelayanan publik di jajaran Pemkab Batang.

Kebijakan eGovernment ini dirintis oleh Yoyok meski dalam format sederhana. Sehingga mulai awal 2017 program tersebut disempurnakan dan diperkuat dengan *Smart City* yang dapat diakses melalui website Pemkab Batang (<https://batangkab.go.id/>).

Berikut penyelenggaraan pemerintahan Bupati Wihaji-Suyono dalam hal *e-Government* seperti gambar di bawah ini:



Gambar 14: Penyelenggaraan pemerintahan bidang *e-Government* Bupati Wihaji

Pada bab ini juga dijelaskan tahapan setelah laporan kemajuan yakni mewawancarai pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti korupsi yakni Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kepala Seksi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II B Direktorat Jenderal Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Shalia A. Jaya mengapresiasi FA yang digagas Yoyok karena membuka kran transparansi langsung ke publik. Namun sebaiknya ditunjang dengan pertanggungjawaban yang baik sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sudah pula diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga hasilnya valid. Kegiatan ini juga harus dilihat bagaimana output dan tujuan hakikinya.

Pelaksanaan FA tidak terlepas dari biaya sehingga menurut Shalia jika kemampuan keuangan daerah ada silahkan saja mengadakan event tersebut. Tapi tetap mengacu pada efisiensi anggaran yang kini digencarkan pemerintah pusat. Hal terpenting FA harus sinkron sesuai yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) hingga di Rencana APBD (RAPBD). Karena pada dasarnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bebas melakukan kreasi program-program kegiatan yang bersinergi dengan Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) sesuai tugas dan fungsi.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan Shalia A. Jaya:

“Sepengetahuan saya selama bertugas di Subdit Wilayah II B Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, belum ada pemerintah daerah yang mengadakan Festival Anggaran selain Pemkab Batang. Event Festival Anggaran ini bagus dan penting sebagai bentuk transparansi untuk mencegah KKN. Akan lebih bagus lagi jika dalam pelaksanaan tersebut angka-angka yang ditampilkan dalam FA disandingkan dengan hasil audit BPK sehingga valid. Kegiatan ini tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah. Beda kepemimpinan beda pula kebijakannya, namun semangat pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi harus tetap dilancarkan.”¹⁵ daerah.

Deputi Koordinator ICW, Ade Irawan menekankan FA Batang sebagai langkah awal dari Bupati Yoyok untuk memberantas korupsi. Ada *will* dan *action*

¹⁵ (Sumber: wawancara peneliti dengan Kasi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II B Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Shalia A. Jaya di kantor Kemendagri pada 6 November 2017)

dari kepala daerah untuk memastikan anggarannya tidak dikorupsi. Jarang ada kepala daerah yang mau terbuka terkait tata kelola APBD. Sebaliknya banyak kepala daerah yang berusaha menutup anggaran karena banyak kepentingan seperti proyek ataupun bagi-bagi proyek.

Menurut Ade, Festival Anggaran berarti membuka anggaran agar publik dapat mengetahui asal dan penggunaan anggaran. Syaratnya kepada daerah harus tidak beritikad buruk untuk menyalahgunakan anggaran. Harapannya publik sebagai pemangku kepentingan utama di anggaran dapat mengawasi langsung sehingga ruang untuk melakukan korupsi semakin sempit karena lemahnya pengawasan.

ICW sangat mendukung transparansi yang dilakukan Yoyok melalui FA dan mendorong Yoyok mendapatkan Bung Hatta Anti Korupsi Award pada 2015. Kiprah Yoyok ini dinilai baik dan bagus dengan memastikan anggarannya tidak dikorupsi dan kebijakan tersebut berjalan sehingga masyarakat bisa sejahtera.

Catatan kritis dalam kajian ICW, selain transparansi masalah utama menyangkut partisipasi masyarakat yang dilibatkan mulai proses perencanaan, penyusunan anggaran, pembahasan anggaran hingga pengesahan APBD sehingga terjadi interaksi dengan birokrat. Pola korupsi anggaran daerah terjadi pada proses perencanaan baik itu di sektor penerimaan maupun sektor belanja. Sehingga akan lebih baik jika FA diawali dari proses perencanaan yang partisipatif dan pertanggungjawaban FA juga harus dipublikasikan. Dalam proses perencanaan, sejak awal kebutuhan dan masalah publik diakomodir secara langsung yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tapi yang terjadi selama ini banyak usulan masyarakat yang ‘hilang’ di pembahasan dan gagal masuk di APBD.

Ade berpendapat FA Batang jangan dihilangkan, tapi harus dikembangkan karena sudah menjadi ikon bagi Pemkab Batang dan mendorong *branding city* bagi Pemkab Batang. Pengembangan FA yang mengandung proses perencanaan yang partisipatif dan penganggaran menjadi penekanan, ketimbang dipamerkan di booth.

Berikut petikan wawancara peneliti dengan Ade Irawan:

“Festival Anggaran Batang tidak hanya menampilkan penggunaan APD yang sudah berjalan tahun sebelumnya tapi menampilkan secara

keseluruhan hingga ke penyusunan anggaran. Jika hanya menampilkan yang sudah jadi, sebetulnya sudah bagus tapi belum lengkap. Selain dipamerkan di booth-booth, apakah Festival Anggaran bisa diakses melalui website sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk mengetahuinya. Hal ini penting seiring dengan teknologi yang kian canggih dan di era digital. Festival Anggaran Batang tidak ada oleh bupati baru, tapi jika gantinya jauh lebih baik khususnya untuk memberantas korupsi, ini tidak masalah. Kecuali jika tidak ada sama sekali program-program pengganti Festival Anggaran.”¹⁶

5.3 LUARAN YANG DICAPAI

Luaran yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemakalah pada temu ilmiah nasional.
- b. Publikasi ilmiah yang memiliki ISSN.
- c. Model kebijakan komunikasi Festival Anggaran.

¹⁶ (Sumber: wawancara peneliti dengan Deputi Koordinator ICW, Ade Irawan di kantor ICW pada 15 November 2017).

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, analisa dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan FA berasal dari ide dasar Yoyok selaku kepala daerah untuk membuka akses kepada publik terkait transparansi pengelolaan APBD. Semula komunikasi organisasi FA cenderung satu arah, namun berkembang menjadi komunikasi transaksi setelah Yoyok menjalin jaringan dengan berbagai pihak yang berkompeten di antaranya Ombudsman, KPK, LSM anti korupsi seperti ICW, FITRA dan TII.
2. Kebijakan komunikasi FA merupakan kebijakan politis dari Yoyok selaku komunikator dalam menyampaikan pesan kepada jajarannya terkait transparansi untuk memberantas KKN. Pesan tersebut dalam rangkaian komunikasi politik yang bertujuan masyarakat menjadi kritis terhadap tata kelola anggaran daerah dan pembangunan. FA Batang diadopsi pemerintah daerah yakni Pemkab Karanganyar pada 2016 dan 2017 yang memamerkan anggaran tahun berjalan, di tingkat nasional inovasi Yoyok ini menginspirasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan menggelar Open Portal Data APBN pada Oktober 2017.
3. Proses pembuatan kebijakan komunikasi FA sesuai Dunn (2003) diawali dari penyusunan agenda yang mengusung tema transparansi dan memberantas KKN, formula kebijakan ditandai dengan tidak adanya aturan khusus (regulasi) akan FA namun kegiatannya menginduk sesuai RPJMD 2012-2017, adopsi kebijakan dengan adanya dukungan dari KPK, Ombudsman dan LSM anti korupsi. FA Batang 2016 berlangsung 3 hari pada 13 Maret 2016 dan dievaluasi sebagai bahan kajian Pemkab setempat.

4. Penerapan kebijakan komunikasi FA Batang 2017 terkendala dengan berakhirnya masa tugas Yoyok. Dipimpin Bupati Wihaji (2017-2022) yang dilantik pada Mei 2017, mencoret FA dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Namun Wihaji tetap berkomitmen menjalankan transparansi anggaran serta membuka akses bagi publik melalui pelayanan *e-Government* dan *smart city*.

6.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.Saran agar FA Batang tetap dapat menjadi program rutin Pemkab Batang sebagai wadah pertanggungjawaban kepada publik yang langsung, terbuka, utuh dan dialogis.
- 2.Pemangku kepentingan khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi dapat mendorong pemerintahan daerah untuk membuka akses bagi publik yang luas melalui FA yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 2008. *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek*. Edisi I. Gava Media. Yogyakarta.
- Afdjani, Hadiono. 2014. *Ilmu Komunikasi, Proses dan Strategi*. Cetakan II. Universitas Budi Luhur dan Indigo Media. Jakarta.
- Aziz, Abdul. 2017. Persepsi Masyarakat Batang Terhadap Festival Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Batang. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16585>. 6 (3). Diakses pada Agustus 2017.
- Ahmad, MM. 2017. Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Batang (Kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo, Periode 2012-2017). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/issue/view/1001>. 6 (3). Diakses Agustus 2017.
- Andrianto, Muhammad. 2012. Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi II disunting oleh Muhadjir Darwin. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Indriasari, Sonia. 2009. Pengelolaan Festival Budaya di Indonesia. Studi Kasus: Pengelolaan Festival Tradisi Lisan Maritim Wakatobi. Universitas Indonesia. Depok.
- Isnaini, Muh. 2011. Komunikasi Organisasi Di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Perguruan Tinggi XY. Universitas Indonesia. Depok.
- Julianti. 2015. Formulasi Strategi Komunikasi Kebijakan Kehutanan: Kasus Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Littlejohn, S.W. dan Foss, K.A. *Teori Komunikasi*. Edisi IX. Salemba Humanika. Jakarta.
- Mulyana, Dedy. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Noor, Any. 2013. *Management Event*. Cetakan II. Alfabeta. Bandung.
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Romli, Khomsahrial. 2014. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Edisi revisi. Grasindo. Jakarta.

Ruben, B.D. dan Stewart L.P. 2014. *Communication and Human Behavior* (fifth edition). Edisi I. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Suzeta, Paskah. 2006. Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Rapat Koordinasi Nasional Departemen Komunikasi dan Informatika 2006 di Jakarta.

[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Daftar%20Pidato/2\)%20Menteri%20Negara%20PPN%20atau%20Kepala%20Bappenas/KEBIJAKAN%20DAN%20STRATEGI%20PERENACANAAN%20BIDANG%20KOMUNIKASI%20DAN%20INFORMASI.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Daftar%20Pidato/2)%20Menteri%20Negara%20PPN%20atau%20Kepala%20Bappenas/KEBIJAKAN%20DAN%20STRATEGI%20PERENACANAAN%20BIDANG%20KOMUNIKASI%20DAN%20INFORMASI.pdf).

Diakses pada September 2016.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Edisi I. Alfabeta. Bandung.

Yananda, M. Rahmat & Salamah, Umi. 2014. *Branding Tempat: Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi Berbasis Identitas*. Makna Informasi. Jakarta.

<http://www.antikorupsi.org/en/node/56203> diunduh pada Minggu (24 April 2016).

<http://www.kamusq.com/2013/04/analisa-adalah-definisi-dan-arti-kata.html>) diakses pada Rabu (27 April 2016).

http://batangkab.go.id/?page_id=142

Harjana, Andre dalam Buku Audit Komunikasi, Teori dan Praktek (<http://www.kamusbesar.com/64003/kebijakankebijakan-komunikasi>)

<http://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-contoh-bentuk-struktur-organisasi/> diakses pada Rabu 13 September 2017 pkl 13.00)

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1262> (diakses pada 13 September 2017 pkl: 15.30)

<https://wsmulyana.wordpress.com/tag/everett-m-rogers/>

<http://www.karanganyarkab.go.id/20171030/penutupan-karanganyar-expo-dan-festival-anggaran-2017-2/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen

Berikut daftar pertanyaan dan jawaban dari sejumlah nara sumber:

1. Bupati Batang periode 2012-2017, Yoyok Riyo Sudibyo.

Peneliti mewawancarai Yoyok di kantor Pemkab Batang pada 15 Maret 2016.



a. Apa latar belakang diadakannya Festival Anggaran Batang?

“Sesuai janji saya kepada rakyat, maka setiap tahun saya akan melaporkan langsung hasil kerja saya kepada rakyat, selain laporan normatif ke DPRD. Dengan cara ini saya ingin membangun partisipasi publik. Pelaksanaan Festival Anggaran juga dimaksudkan sebagai rangkaian peringatan HUT Kabupaten Batang pada Februari. Sejak Indonesia merdeka, baru Kabupaten Batang yang mengadakan kegiatan ini.”

b. Apa tujuan diadakannya Festival Anggaran Batang?

“Pemerintah kini semakin berupaya mewujudkan *good governance*, salah satunya melalui transparansi informasi publik yang akurat dan memadai tentang pemerintah kepada publik untuk mencegah KKN. Berkaitan pengelolaan keuangan daerah, sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperlihatkan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Festival Anggaran sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban uang rakyat kepada rakyat yang selayaknya bisa menjadi agenda rutin untuk

memberantas KKN, penguatan ekonomi daerah dan masyarakat Batang yang sejahtera. Karena rakyat bisa secara langsung bertanya tentang penggunaan anggaran ataupun program pembangunan kepada aparat, memberi masukan ataupun komplain. Dengan cara ini mendorong rakyat untuk ikut peduli dalam proses pembangunan.”

c. Mengapa Festival Anggaran Batang 2016 tidak sesuai jadwal?

“Koordinasi yang kurang cermat di antara panitia sehingga menyebabkan acara molor. Hal ini karena adanya lintas koordinasi antar SKPD, EO, LSM dan pihak terkait lainnya. Mengatasi kendala ini dengan meningkatkan koordinasi dan dukungan semua SKPD, instansi vertikal dan unsur masyarakat.”

2. Sekda Batang, Nasikhin

Peneliti mewawancari Nasikhin di kantor Pemkab Batang pada 18 Mei 2017.



a. Bagaimana implementasi Festival Anggaran Batang 2016?

“Festival Anggaran 2016 fokus pada 4 komponen yakni bidang pengelolaan keuangan daerah, bidang pembangunan infrastruktur urusan wajib/pelayanan dasar, bidang pelaksanaan pelayanan publik dan bidang penyelenggaraan pembangunan desa. Jadi pengelompokkannya tidak menurut jumlah SKPD. Tenda pameran indoor dengan partisi, anggaran APBD sebesar Rp381 juta yang berasal dari DPA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang. Selama 3 hari diisi dengan serangkaian acara seperti seminar nasional dan diskusi publik serta hiburan dan wayang. Hal yang menjadi primadona

karena pengunjung bisa melihat sendiri gaji bupati dan wakil bupati serta Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD selain pengelolaan APBD sesuai 4 komponen dari masing-masing booth.”

3.Asisten I Sekda Batang, Retno Dwi Irianto

Peneliti mewawancari Retno Dwi Irianto di kantor Pemkab Batang pada 16 Maret 2016.



a. Apakah Festival Anggaran Batang 2016 diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Bupati atau Peraturan Bupati?

“Untuk pelaksanaan Festival Anggaran Batang 2016 secara spesifik tidak ada SK Bupati, Peraturan Bupati ataupun Perda. Karena pada dasarnya hal ini merupakan pelaksanaan program kerja. Dikaitkan Festival Anggaran 2016 dahulu masuk dalam Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang kini berganti menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Anggaran tersebut untuk membiayai tempat dan infrastruktur pendukung.”

b. Bagaimana format Festival Anggaran Batang 2016?

“Gagasan pak bupati untuk penyelenggaraan Festival Anggaran 2016 tetap mengacu pada Festival Anggaran 2014 namun lebih terarah dan lebih fokus. Pada Festival Anggaran 2014 mulai menggunakan event organizer namun belum sistematis. Pada Festival Anggaran 2016, kami tetap menggunakan event organizer sesuai aturan dengan biaya APBD dan sebagian dari pihak swasta melalui dana CSR. Dalam Festival Anggaran 2016, kami menampilkan kegiatan pembangunan 2014 dan 2015 serta rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pada 2016 yang menampung masukan atau aspirasi masyarakat.”

c. Bagaimana kiprah Pemkab Batang di era bupati baru setelah tidak adanya Festival Anggaran apakah akan menyuburkan KKN?

“Pada pemerintahan bupati saat ini memang tidak ada lagi Festival Anggaran, karena menilai dengan sistem *e-government* yang dapat setiap saat diakses masyarakat. Sehingga sistem pelayanan publik berbasis IT inilah yang kami perkuat. Artinya jika pelaksanaan sama (Festival Anggaran) berarti tidak ada perubahan. Meski Batang tidak lagi mengadakan Festival Anggaran, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kami menjadi rujukan atau studi banding bagi sejumlah pemerintah daerah yang belajar tentang *e-government* dan alih sistem *e-government*. Setiap hari dari sejumlah pemerintah daerah belajar tentang *e-government* mulai *e-planning*, *e-budgeting* dan lainnya.”

4. Kepala BPPKAD Kabupaten Batang, Asri Hermawan

Peneliti mewawancarai Asri Hermawan di kantor Pemkab Batang pada Mei 2017.



a. Mengapa pada 2017 tidak diadakannya Festival Anggaran Batang?

Seiring pergantian kepala daerah, Festival Anggaran Batang 2017 ditiadakan. Namun spirit untuk menjalankan transparansi untuk informasi publik tetap diterapkan melalui penerapan *e-government* dan diperkuat dengan *smart city*.

Bagaimana dengan Festival Anggaran Batang 2018? Berikut jawaban Asri Hermawan kepada peneliti:

“Kami sudah mengalokasikan dana sekitar Rp600 juta untuk membiayai event semacam Festival Anggaran pada 2018, namun akan dilakukan melalui sarana yang lebih murah misalnya dengan memasang iklan di media massa, TV, radio dan media sosial. Format detilnya tentu harus dibahas di tingkat pimpinan dan koordinasi dengan DPRD. Masyarakat tetap dapat bisa mengakses informasi pembangunan termasuk anggaran secara online melalui website Pemkab Batang, ataupun bisa melihat langsung videotron di alun-alun yang menampilkan berbagai program pembangunan Kabupaten Batang secara keseluruhan.”

5. Bupati Batang Wihaji (2017-2022)

Peneliti mewawancarai Wihaji di kantor Pemkab Batang pada Agustus 2017.



a. Sebagai bupati terpilih periode 2017-2022 apakah tahun ini akan melaksanakan Festival Anggaran Batang yang merupakan inovasi Bupati Yoyok?

“Sebagai kepala daerah yang dipercaya rakyat, saya akan meneruskan program atau kebijakan pimpinan sebelumnya. Mana yang bagus ya monggo silahkan diteruskan, seperti pembangunan inovasi pelayanan publik berbasis *e-government* dan kini kami perkuat dengan *smart city*. Adapun untuk Festival Anggaran yang digagas pak Yoyok, saya akan menggunakan dengan cara lain kan tidak mesti sistemnya harus sama. Saya tidak maruk *award* (penghargaan) karena tidak mengadakan Festival Anggaran. Saya juga tidak khawatir *branding* Kabupaten Batang akan anjlok karena tak lagi ada Festival Anggaran dan saya tidak butuh pencitraan. Karena saya lebih memprioritaskan pembangunan mendasar antara lain pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk rakyat saya agar sejahtera.”

Terkait kendala biaya, Wihaji menampiknya. Ia berpendapat anggaran tidak menjadi masalah sepanjang kegiatan tersebut memang tepat dan dibutuhkan masyarakat Batang. Namun ia menolak menyebutkan sistem apa yang akan diterapkan sebagai pengganti Festival Anggaran, karena mengaku sedang memperkuat konsolidasi internal di jajaran setelah Mei dilantik.

Bahkan ia mengeluarkan pernyataan yang bersifat ambigu sebagai berikut:

“Saya bertugas 5 tahun ke depan. Siapa tahu di tahun depan atau tahun selanjutnya bakal ada lagi pola semacam Festival Anggaran jika memang masyarakat mendesak dan didukung wakil rakyat.”

6. Ketua DPRD Batang, Teguh Raharjo

Peneliti mewawancarai Teguh Rahardjo di kantor DPRD Batang pada Mei 2017.



a. Apa tanggapannya selaku Ketua DPRD Batang dengan ditiadakannya Festival Anggaran Batang?

“Saya setuju Festival Anggaran Batang tahun ini tidak ada lagi, karena untuk transparansi anggaran bisa tanpa festival tapi bisa dengan banyak cara. Kegiatan Festival Anggaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih urgent sifatnya. Misalnya untuk membiayai sektor pendidikan, usaha kecil, kesehatan bagi warga miskin maupun mendorong sektor pariwisata sehingga pariwisata Batang dapat berkembang dan mendulang pendapatan asli daerah (PAD. Namun jika pada kenyataannya mayoritas masyarakat menghendaki supaya Festival Anggaran diadakan kembali, kami selaku pihak legislatif akan mendorong eksekutif untuk mengusahakannya.”

7. Wakil Bupati Batang periode 2017-2022, Suyono

Peneliti mewawancarai Suyono di Pemkab Batang pada Mei 2017.



Apa tanggapannya selaku Wabup Bupati dengan ditiadakannya Festival Anggaran Batang?

“Saya setuju dihapusnya Festival Anggaran dari agenda rutin Pemkab Batang. Alasannya di era digital, masyarakat dapat mengakses langsung program pembangunan yang dijalankan Pemkab Batang termasuk menyangkut penggunaan APBD melalui website: <https://batangkab.go.id/>. Sehingga dana Festival Anggaran bisa digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat antara lain untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Secara khusus saya tidak ingin terjebak dalam pencitraan, karena Festival Anggaran menurut saya sarat akan pencitraan.”

8. Ketua Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) Batang, Abdul Wahid.

Peneliti mewawancarai UPKP2 Batang di Pemkab Batang pada Mei 2017



- a. Apa tanggapannya dengan ditiadakannya Festival Anggaran Batang?
“Berharap jajaran Pemkab Batang dipimpin Bupati Wihaji dapat mempertahankan *performance* yang sudah baik untuk dilanjutkan demi memajukan kawasan Batang melalui berbagai inovasi. Sejatinya Festival Anggaran bisa dilakukan di mulai di tingkat desa, kelurahan, kabupaten

dan di jenjang selanjutnya tentang penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban. Kiprah ini menjadi akses masyarakat untuk mengetahui pengelolaan anggaran oleh birokrat. Format Festival Anggaran jika pun tidak diadakan lagi dapat dirubah atau disederhanakan. Hal terpenting spirit untuk membangun kinerja birokrat mengacu akuntabilitas, transparan dan partisipatif. Masyarakat sebagai pemanfaat dan pengawas jalannya pembangunan. Adanya keterbukaan kinerja aparat sehingga membangun partisipasi publik yakni munculnya feed back positif dari masyarakat. Serta keterbukaan akan usulan masyarakat terhadap program pembangunan. Pada hakekatnya Festival Anggaran sebagai wahana untuk membangun spirit bersama dari para stakeholder dan membangun jalur interaksi sosial masyarakat dengan pamong. Jika mengandalkan transparansi publik khususnya menyangkut soal penggunaan anggaran berbasis IT, tidak semua masyarakat memiliki akses IT dan belum tentu semua masyarakat sudah melek IT. Ini hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak eksekutif.”

9. Kepala Seksi Dinas Kominfo Pemkab Batang, Novia Ekawati.

Peneliti mewawancarai Novia di kantor Pemkab Batang pada Mei 2017.



a. Dengan tidak adanya lagi Festival Anggaran Batang, upaya apa yang dilakukan Pemkab Batang untuk menerapkan e-government?

“Sejak awal 2016 Pemkab Batang di era Yoyok mulai menerapkan *e-planning*, *e-budgeting* dan lainnya. Sistem ini pada 2017 disempurnakan dengan menggunakan program *Smart City*. Sebelumnya pada 2015 Pemkab Batang juga sudah menerapkan *e-lelang* mengacu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan implementasi manajemen yang mendapat pengakuan ISO.

Mengenai kendala yang dihadapi masyarakat Batang dalam mengakses internet, Novia mengakui sebagian kawasan di Batang memang dikenal sebagai

blank spot area untuk internet. Hasil survei Diskominfo pada Maret 2017 memprediksi 10% dari 240 desa yang belum terkoneksi internet. Terutama desa-desa di pegunungan dan berada terjauh dari Pemkab Batang, misalnya saja Desa Kebaturuan, Kalirejo, Gringgingsari, Sodong, Peranten dan Silurah. Sebagai solusinya, Diskominfo berkonsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi hambatan tersebut.

Diskominfo Pemkab Batang juga aktif melatih masyarakat untuk melek IT. Berikut petikan wawancara peneliti dengan Novia Ekawati:

“Kami memiliki bagian pemberdayaan masyarakat untuk melatih masyarakat supaya melek IT dan menjadi kader informasi atau kelompok masyarakat melek informasi. Ada 6 kelompok masyarakat di 6 desa yang kami latih, desa tersebut sudah terkoneksi internet. Antara lain Desa Tambak Boyo, Pandan Sari, Rejosari Barat, Subah dan Limpung. Kegiatan ini merupakan aspirasi masyarakat mulai mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, pelaku usaha dan lainnya yang minta diadakan pelatihan IT sejalan dengan era digital.”

10. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II B Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Shalia A. Jaya

Peneliti mewawancarai Shalia di Kantor Kemendagri, Jakarta pada 6 November 2017.



a. Apa tanggapannya terhadap inovasi Yoyok selaku Bupati Batang 2012-2017 yang mengadakan Festival Anggaran?

“Kami mengapresiasi Festival Anggaran yang digagas Yoyok karena membuka kran transparansi langsung ke publik. Namun sebaiknya ditunjang dengan pertanggungjawaban yang baik sesuai aturan dan

perundang-undangan yang berlaku dan sudah pula diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga hasilnya valid. Kegiatan ini juga harus dilihat bagaimana output dan tujuan hakikinya.

Pelaksanaan Festival Anggaran tidak terlepas dari biaya sehingga menurut Shalia jika kemampuan keuangan daerah ada silahkan saja mengadakan event tersebut. Tapi tetap mengacu pada efisiensi anggaran yang kini digencarkan pemerintah pusat. Hal terpenting FA harus sinkron sesuai yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) hingga di Rencana APBD (RAPBD). Karena pada dasarnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bebas melakukan kreasi program-program kegiatan yang bersinergi dengan Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) sesuai tugas dan fungsi.

“Sepengetahuan saya selama bertugas di Subdit Wilayah II B Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, belum ada pemerintah daerah yang mengadakan Festival Anggaran selain Pemkab Batang. Event Festival Anggaran ini bagus dan penting sebagai bentuk transparansi untuk mencegah KKN. Akan lebih bagus lagi jika dalam pelaksanaan tersebut angka-angka yang ditampilkan dalam FA disandingkan dengan hasil audit BPK sehingga valid. Kegiatan ini tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah.”

11. Deputi Koordinator ICW, Ade Irawan

Peneliti mewawancarai Ade Irawan di kantor ICW di Pancoran, Jakarta Selatan pada 15 November 2017.



a. Apa tanggapannya terhadap inovasi Yoyok selaku Bupati Batang 2012-2017 yang mengadakan Festival Anggaran?

“Festival Anggaran Batang sebagai langkah awal dari Bupati Yoyok untuk memberantas korupsi. Ada *will* dan *action* dari kepala daerah untuk memastikan anggarannya tidak dikorupsi. Jarang ada kepala daerah yang mau terbuka terkait tata kelola APBD. Sebaliknya banyak kepala daerah yang berusaha menutup anggaran karena banyak kepentingan seperti proyek ataupun bagi-bagi proyek.”

Menurut Ade, Festival Anggaran berarti membuka anggaran agar publik dapat mengetahui asal dan penggunaan anggaran. Syaratnya kepada daerah harus tidak beritikad buruk untuk menyalahgunakan anggaran. Harapannya publik sebagai pemangku kepentingan utama di anggaran dapat mengawasi langsung sehingga ruang untuk melakukan korupsi semakin sempit karena lemahnya pengawasan.

ICW sangat mendukung transparansi yang dilakukan Yoyok melalui Festival Anggaran dan mendorong Yoyok mendapatkan Bung Hatta Anti Korupsi Award pada 2015. Kiprah Yoyok ini dinilai baik dan bagus dengan memastikan anggarannya tidak dikorupsi dan kebijakan tersebut berjalan sehingga masyarakat bisa sejahtera.

Catatan kritis dalam kajian ICW, selain transparansi masalah utama menyangkut partisipasi masyarakat yang dilibatkan mulai proses perencanaan, penyusunan anggaran, pembahasan anggaran hingga pengesahan APBD sehingga terjadi interaksi dengan birokrat. Pola korupsi anggaran daerah terjadi pada proses perencanaan baik itu di sektor penerimaan maupun sektor belanja. Sehingga akan lebih baik jika Festival Anggaran diawali dari proses perencanaan yang partisipatif dan pertanggungjawaban Festival Anggaran juga harus dipublikasikan. Dalam proses perencanaan, sejak awal kebutuhan dan masalah publik diakomodir secara langsung yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tapi yang terjadi selama ini banyak usulan masyarakat yang ‘hilang’ di pembahasan dan gagal masuk di APBD.

Ade berpendapat Festival Anggaran Batang jangan dihilangkan, tapi harus dikembangkan karena sudah menjadi ikon bagi Pemkab Batang dan mendorong *branding city* bagi Pemkab Batang. Pengembangan Festival Anggaran yang

mengandung proses perencanaan yang partisipatif dan penganggaran menjadi penekanan, ketimbang dipamerkan di booth.

“Festival Anggaran Batang tidak hanya menampilkan penggunaan APD yang sudah berjalan tahun sebelumnya tapi menampilkan secara keseluruhan hingga ke penyusunan anggaran. Jika hanya menampilkan yang sudah jadi, sebetulnya sudah bagus tapi belum lengkap. Selain dipamerkan di booth-booth, apakah Festival Anggaran bisa diakses melalui website sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk mengetahuinya. Hal ini penting seiring dengan teknologi yang kian canggih dan di era digital. Festival Anggaran Batang tidak ada oleh bupati baru, tapi jika gantinya jauh lebih baik khususnya untuk memberantas korupsi, ini tidak masalah. Kecuali jika tidak ada sama sekali program-program pengganti Festival Anggaran.”

Lampiran 2: Personalia Tenaga Peneliti dan Kualifikasinya

1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Rachmi Kurnia Siregar
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN : 0328016904
- d. Displin Ilmu : Komunikasi
- e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- f. Fakultas : Ilmu Komunikasi
- g. Uraian Kualifikasi :
 - Mengkoordinir kegiatan penelitian
 - Melakukan analisis
 - Menyusun laporan penelitian
- h. Jumlah waktu : 8 Jam/Minggu

2. Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : Wenny Maya Arlena
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIDN : 0311107706
- d. Displin Ilmu : Komunikasi
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Fakultas : Ilmu Komunikasi
- g. Uraian Kualifikasi :
 - Penulisan draft bahan ajar
 - Penyiapan dan publikasi hasil penelitian
- h. Jumlah waktu : 6 Jam/Minggu

Lampiran 3: Publikasi penelitian

1. Prosiding

Cover Depan



PEMAKALAH DAN JUDUL MAKALAH		
No	Nama (Penulis 1)	Judul Makalah
1	Muhammad Sulaim	Improving The Organizational Attractiveness By Communicating Car Practices
2	Dr. Edli Santosa, M.Si	Kontroversi Identitas Di Media Sosial (Diskursus Tentang Karakter Dan Bahasa Berjargon Di Youtube, Twitter Dan Facebook)
3	Bhramadatta Prasita Widyumurti, S.Sos., M.Si	Selera Budaya Priyayi Jawa Dalam Konteks Komunikasi Budaya Tradisional: Studi Pada Budaya Murni Pengantun Jawa Di Kulangan Priyayi
4	Tatag Hendaka, S.Sos., M.Si	Olomoni Dwarah Dan Sistem Komunikasi Pemerintah Dalam Pengembangan Kambing Kaligajih Di Kabupaten Puncung
5	Ariyil Koes Anggita	Konstruksi Sosial Terhadap Berita Taburan Di Media Sosial (Followers Dari Akun Instagram @Lambur, Turki)
6	Sri Dewi Setiawati	Mengapa Harus Penggunaan Model Non Public Figure Sebagai Model Dalam Strategi Komunikasi Pemasaran
7	Iham Prigunanto	Pengukuran Kemampuan Berbicara Di Depan Publik Penalar Dan Motivasi Belajar Peserta Didik (Survei Pendapat Mahasiswa Terhadap Pengajaran Mata Kuliah Metodologi Penelitian Di Sebuah Universitas Swasta, Jakarta)
8	Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom	Komunikasi Organisasi Pengelolaan Apbd (Kebijakan Tata Kelola Apbd Berbasis E-Government Plus Pada Pemerintah Kabupaten Batang Jawa Tengah)

JADWAL PRESENTASI

Hari/Tanggal	Waktu	Rakus 1	Rakus 2	Rakus 3	Rakus 4
Kamis, 7 Desember 2017	08.00-08.15	Amy Fira Agatha, S.Sos.	Wesley David Suryandana, M.Si	Agustina Rudi Darta, S.Sos., M.Si	Amey Rayo Guntoro, M.Si
	08.15-08.30	Edi Pratiwi, S.Sos., M.Si	Nadi Gunawan, S.Sos., M.Si	Amey	Wahid Soham, S.Sos., M.Si
	08.30-08.45	Akhil M. Prasad, S.Sos., M.Si	Edi Pratiwi, S.Sos., M.Si	Amey, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	08.45-09.00	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	09.00-09.15	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	09.15-09.30	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	09.30-09.45	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	09.45-10.00	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	10.00-10.15	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	10.15-10.30	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	10.30-10.45	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	10.45-11.00	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	11.00-11.15	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	11.15-11.30	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	11.30-11.45	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si
	11.45-12.00	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si	Amey Bayu, M.Si

2. Surat Keterangan Penerimaan Jurnal Avant Garde, Volume 5 Nomor 2 Desember 2017, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur



SURAT KETERANGAN

S/UBL/FIK/000/361/12/17

Dinyatakan diterima tulisan ilmiah dengan judul:
**KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS FESTIVAL ANGGARAN III-2017 PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH)**

Tulisan akan dipublikasikan di **JURNAL AVANT GARDE** Volume 5 Nomor 2
Desember 2017, ISSN : 2338-431X, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi
Luhur, Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara – Jakarta Selatan 12260.

Tulisan masih dalam proses *editing*, kemudian setelah melalui *editing* akan
dilanjutkan pada proses *review* oleh Mitra Bestari.

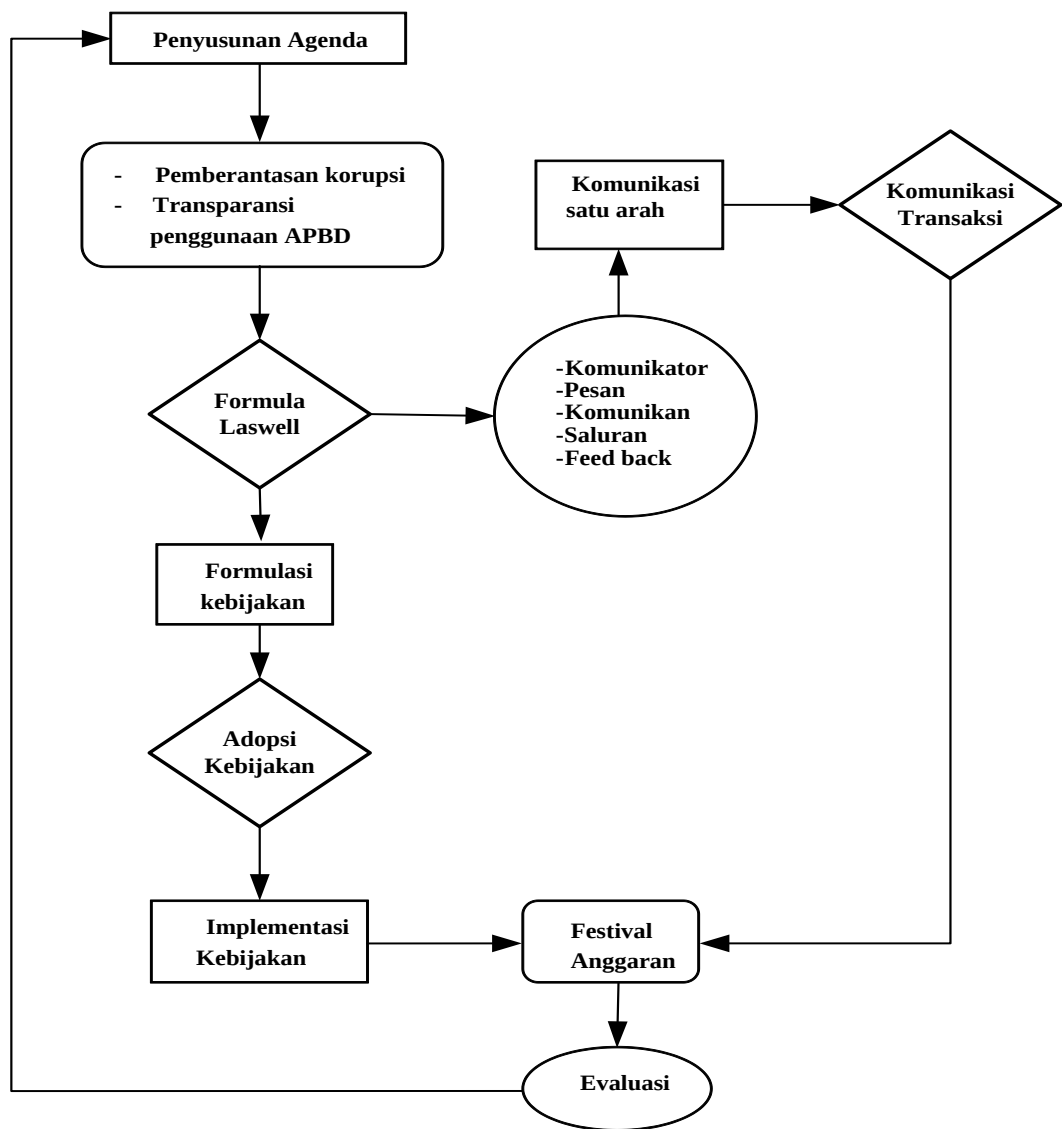
Jakarta, 7 Desember 2017

Hormat kami,
Penanggungjawab Jurnal Avant Garde



Wicky Prasetyo Jati, M.Si

3. Model Komunikasi Festival Anggaran Batang 2016



Sumber : Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom

4. Draft Bahan Ajar

Tatap Muka	Pokok Bahasan
------------	---------------

1	Pengantar Komunikasi Organisasi : • Pandangan-pandangan Komunikasi Organisasi dalam lembaga Pemerintah Pusat. • Pandangan-pandangan Komunikasi Organisasi dalam lembaga Pemerintah Daerah
2	Pengertian Komunikasi : • Komunikasi menurut Laswell, Hovland, Gerald R. Miller,
3	Pengertian Organisasi : • Organisasi menurut Rogers M Everest,,
4	Pengertian Komunikasi Organisasi menurut • Josep Devito • R. Wayne Pace & Don F. Faule, • Goldhaber
5	Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi : • Menurut Ruben • Menurut Conrad • Menurut
6	Struktur Organisasi : • Struktur Organisasi Pemerintah Pusat • Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
7	Dimensi Komunikasi Dalam Organisasi : • Komunikasi internal organisasi • Komunikasi eksternal organisasi
8	Teori Informasi Organisasi dan Model : • Teori • Model
9	Kebijakan Komunikasi : • Kebijakan komunikasi berkaitan dengan perkembangan sosial • Kebijakan komunikasi berkaitan dengan perkembangan politik • Kebijakan komunikasi berkaitan dengan ekonomi

10	Proses Komunikasi dalam Organisasi : • Proses Komunikasi Vertikal • Proses Komunikasi Horizontal
11	Proses Kebijakan Komunikasi Organisasi : • • •
12	Proses Pembuat Kebijakan Komunikasi Organisasi : • • •
13	Contoh-contoh hasil penelitian yaitu Komunikasi Organisasi dan penerapan kebijakan dalam Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia
14	Tugas mahasiswa menganalisa kasus-kasus yang berhubungan dengan komunikasi dan kebijakan dalam organisasi Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah